

Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Kecamatan Wonosobo

(Studi Desa Wonosari dan Desa Bomerto)

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Nazula Winandra

Nomor Mahasiswa : 18313292

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Kecamatan Wonosobo

(Studi Desa Wonosari dan Desa Bomerto)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Nazula Winandra

Nomor Mahasiswa : 18313292

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Penulis



Nazula Winandra

PENGESAHAN

Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Kecamatan Wonosobo
(Studi Desa Wonosari dan Desa Bomerto)

Nama : Nazula Winandra
Nomor Mahasiswa : 18313292
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 5 Januari 2022
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PERANAN DANA DESA DALAM MENGATASI EKONOMI DESA DI KECAMATAN
WONOSOBO (STUDI DESA WONOSARI DAN DESA BOMERTO)**

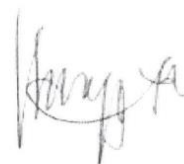
Disusun Oleh : **NAZULA WINANDRA**

Nomor Mahasiswa : **18313292**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Kamis, 10 Februari 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi,Dr.,M.Si.



Penguji : Jannahar Saddam Ash Shidiqie,,S.E.I., M.E.K.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang penulis sayangi, teruntuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Kusnandar dan Aning Widihastini, malaikat pelindung yang telah banyak mendukung, mendoakan disetiap sujud dan disetiap sepertiga malam-Nya, yang selalu ikhlas dan sabar memberikan waktu, tenaga, materi dan semuanya untuk kebahagiaan penulis.
2. Nenek tercinta, Budirah, wanita tangguh dan penyayang yang selalu mendoakan disetiap sujud dan sepertiga malam-Nya, yang selalu mendukung penulis di setiap langkahnya hingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Kepada saudara kandung, Anggini Winandra dan Danurvando Winandra, terima kasih selalu mendukung penulis di setiap langkahnya, terutama untuk kakak penulis, Anggini Winandra terima kasih telah memberi penulis banyak solusi setiap permasalahan yang penulis hadapi, terima kasih telah mendukung penulis dari waktu, tenaga hingga materi.
4. Kepada keluarga besar Kastamar, terima kasih penulis ucapkan yang selalu mendoakan dan selalu memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Yasinta Khusna Amalia, sahabat seperjuangan penulis, terima kasih selalu ada untuk penulis, terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik, penenang dalam segala permasalahan yang penulis alami dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman penulis yang penulis sayangi, Fata Widayanti, Annisa Anggraeni, Bunga Mega Rossada, Fitrach Lailia Balqis, terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik serta selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Kecamatan Wonosobo, terima kasih telah memudahkan dalam proses pengumpulan data serta penulisan skripsi dan terima kasih penulis ucapkan atas pengalaman magang yang telah diberikan kepada penulis selama satu bulan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Kecamatan Wonosobo (Studi Kasus Desa Wonosari dan Desa Bomerto)”***. Skripsi ini merupakan syarat wajib bagi setiap mahasiswa agar memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini dapat selesai tidak lepas dari adanya bimbingan, dukungan, dan doa dari beberapa pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA. Ketua Prodi Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar membimbing penulis dan tidak henti-hentinya memberi semangat serta saran yang sangat banyak hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Jannahar Saddam Ash Shidiqie, S.E.I., M.E.K. dosen penguji skripsi penulis.
6. Seluruh dosen dan staff pengajar Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Muhammad Said, S.Sos, MM. Camat Kecamatan Wonosobo, Bapak Drs. Priswanto Wahyunugroho Sekretaris Camat Kecamatan Wonosobo, dan Bapak Randi Ramadhan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo.
8. Sekretaris Desa Wonosari Ibu Sandia Rini dan Sekretaris Desa Bomerto Bapak Sudibyo yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.

9. Ibu Towilah dan Ibu Iryawati yang telah bersedia menjadi informan pendukung dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dalam lindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 5 Januari 2022

Penulis



Nazula Winandra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	4
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR GAMBAR.....	11
DAFTAR LAMPIRAN.....	12
HALAMAN ABSTRAK.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.2 Landasan Teori	16
1. Dana Desa	16
2. Kemiskinan.....	18
3. Urbanisasi	19
4. Pengangguran.....	20
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
6. Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan, Urbanisasi, dan Pengangguran	22
2.3 Kerangka Pikir.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian	24
3.2. Lokasi Penelitian.....	24
3.3. Situasi Sosial.....	25
3.4. Informan.....	25
1. Pengertian Informan dan Jenis Informan	25
2. Jumlah Informan	25
3. Teknik Pemilihan Informan	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Observasi	26
2. Wawancara Mendalam (<i>In-depth Intervien</i>)	26
3. Dokumentasi	26
3.6. Teknik Analisis Data.....	27
3.7. Uji Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum	30
A. Kecamatan Wonosobo	30
B. Desa Wonosari.....	31
C. Desa Bomerto	33
D. Identifikasi Informan	35
4.2 Hasil Analisa Penelitian.....	37
A. Prioritas Dana Desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto	41
B. Penggunaan Dana Desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto.....	42
4.3 Pembahasan	44
4.3.1 Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Kecamatan Wonosobo.....	46
4.3.2 Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Desa Wonosari	48
4.3.3 Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Desa Bomerto	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Wonosari	32
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bomerto	34
Tabel 4.5 APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosari.....	38
Tabel 4.6 APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bomerto	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wonosobo	30
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Wonosari	33
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Wonosari	35
Gambar 4.4 Gambaran Umum Informan Penelitian	45
Gambar 4.5 Karakter Informan berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Gambar 4.6 Kata Kunci	46
Gambar 4.7 Hasil Wawancara Randi Ramadhan Kasi Pemerintahan Kec. Wonosobo.....	47
Gambar 4.8 Hasil Wawancara Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari Kec. Wonosobo.....	49
Gambar 4.9 Hasil Wawancara Towilah Masyarakat Desa Wonosari Kec. Wonosobo.....	52
Gambar 4.10 Hasil Wawancara Sudiby Sekretaris Desa Bomerto Kec. Wonosobo.....	53
Gambar 4.11 Hasil Wawancara Iryawati Masyarakat Desa Bomerto Kec. Wonosobo.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A HASIL PENELITIAN	64
LAMPIRAN B TRANSKRIP WAWANCARA	70
LAMPIRAN C DOKUMENTASI	84



HALAMAN ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Kebijakan dana desa ini sejalan dengan pembangunan negara yang berpusat di desa. Presiden Joko Widodo melalui Nawacita berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dengan meningkatkan pembangunan desa. Pemerintah berharap dengan adanya dana desa dapat mengatasi ekonomi desa seperti mengentaskan kemiskinan, menekan angka urbanisasi, serta mengurangi pengangguran di desa, pemerintah pusat berharap bahwa dengan adanya dana desa dapat membuka lapangan pekerjaan dengan pemberdayaan BUMDes.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara yang selanjutnya pengolahan data menggunakan *software* Nvivo 12 Plus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

Hasil penelitian ini adalah dana desa telah berperan dalam mengatasi kemiskinan di Desa Bomerto dan Wonosari. Dana desa juga berperan dalam menekan angka urbanisasi di Desa Wonosari tetapi dana desa belum mampu berperan dalam menekan angka urbanisasi di Desa Bomerto. Dana desa telah berperan dalam mengatasi pengangguran di Desa Wonosari dan Desa Bomerto dengan adanya pemberdayaan BUMDes maka banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di desa. Jadi, dana desa sudah berperan dalam mengatasi ekonomi desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto namun dana desa kurang berperan dalam mengatasi urbanisasi di Desa Bomerto.

Kata Kunci : dana desa, kemiskinan, urbanisasi, pengangguran, BUMDes.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara adalah berhubungan secara langsung dengan masyarakat desa. Di Indonesia pergerakan perekonomiannya tidak hanya berpusat di ibu kota saja namun desa juga menjadi pusat pergerakan ekonomi. Sebesar 70 persen dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di desa, oleh sebab itu titik pusat pembangunan berada di desa (Larosa, 2017). Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam pembangunan di tingkat daerah maupun pusat ditentukan dari desa, karena kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu negara.

Terbelakang dan miskin adalah profil lama desa, hingga saat ini desa masih belum bisa terlepas dari profil tersebut, bahkan dari sisi ekonomi desa masih dipandang rendah. Pembangunan berbasis perdesaan memang sudah sewajarnya harus menjadi prioritas utama, apabila hal ini tidak dilakukan maka akan terjadi peningkatan kesenjangan antara kota dan desa terutama dalam hal perekonomian. Sejalan dengan pembangunan negara yang berpusat di desa, Presiden Joko Widodo melalui Nawacita berkomitmen akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan meningkatkan pembangunan desa (Kemenkeu RI, 2019), artinya Presiden Joko Widodo akan membangun negara dengan meningkatkan pembangunan di desa, dari pembangunan fisik hingga pemberdayaan manusia di desa.

Permasalahan di desa tidak lepas dari tingginya penduduk miskin, meningkatnya angka urbanisasi, kurangnya lapangan pekerjaan serta infrastruktur desa yang kurang memadai. Hal ini muncul karena adanya kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota. Menurut World Bank kemiskinan yang terjadi di Indonesia sebagian besar terjadi di pedesaan. Persentase penduduk miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2021), pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 15,26 persen sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 26,02 persen, melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Adanya perbedaan jumlah dan persentase penduduk miskin antara desa dan kota menimbulkan inisiatif masyarakat desa untuk mencari pekerjaan di kota. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di perkotaan. Indonesia adalah salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, diprediksi terus meningkat menjadi 66,6 persen pada tahun 2035. Pada tahun 2045 World Bank pun memperkirakan sebanyak 220 juta orang atau 70 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan (Isyanah, 2020). Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2017) mengatakan bahwa jika tidak ada intervensi mengenai urbanisasi, diprediksikan pada tahun 2030 penduduk desa hanya sekitar 30 persen. Artinya bahwa akan semakin banyak masyarakat desa yang meninggalkan desanya untuk pergi ke kota dengan harapan perekonomian mereka menjadi lebih baik.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut pemerintah memfokuskan pembangunan negara dengan berbasis perdesaan. Pemerintah percaya bahwa dengan pembangunan berbasis perdesaan ini dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat perekonomian negara serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Kebijakan dana desa merupakan bentuk implementasi dari strategi pemerintah dalam membangun negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya desa diberikan wewenang dalam mengatur daerahnya sendiri namun harus tetap sejalan dengan maksud dan tujuan dari pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan (Abdullah, 2019). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan, harus didasarkan pada hak asal usul, kewenangan dalam konteks skala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa menjelaskan bahwa dana desa dilaksanakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Jumlah dana desa pun selalu meningkat signifikan setiap tahunnya, pada tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp20,77 Triliun kemudian pada tahun 2018 dana desa dianggarkan sebesar Rp60 Triliun. Pada tahun 2019 dana desa meningkat kembali sebesar Rp70 Triliun. Kinerja penyaluran dana desa sendiri pada tahun 2018 sebesar Rp60 Triliun atau 99,77 persen dari pagu alokasi. Realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp59,77 Triliun atau 99,61 persen dari pagu alokasi (Kemenkeu RI, 2019). Menurut Kementerian Keuangan RI (2019) mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa merupakan arah kebijakan dana desa di tahun 2020. Pada tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021).

Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah sejak dimulainya kebijakan dana desa :

Tabel 1. 1 Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Perkotaan		Perdesaan	
	Jumlah Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Jumlah Kemiskinan	Persentase Kemiskinan
2015	3.626.760 jiwa	23,35%	5.456.060 jiwa	29,91%
2016	3.703.630 jiwa	22,82%	5.297.010 jiwa	29,77%
2017	3.704.570 jiwa	21,76%	4.943.550 jiwa	28,69%
2018	3.425.720 jiwa	19,40%	4.338.900 jiwa	25,79%
2019	3.236.220 jiwa	18,19%	4.186.410 jiwa	24,74%
2020	3.969.140 jiwa	20,66%	4.404.690 jiwa	26%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah Tahun 2015-2020

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sejak dimulainya kebijakan dana desa tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan namun pada tahun 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Berbeda dengan perdesaan yang jumlah penduduk miskinnya turun setiap tahunnya justru di perkotaan mengalami kenaikan di tahun 2015-2017. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di perkotaan cenderung menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal yang sama juga pada tahun 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan dikarenakan pandemi covid-19. Melalui data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik jika dibandingkan, kemiskinan di perdesaan masih sangat tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan.

Kebijakan dana desa ini juga diharapkan dapat menekan peningkatan urbanisasi di Indonesia. Adanya kebijakan dana desa ini desa dapat berkembang terutama dari sisi ekonomi, ketika desa dapat tumbuh dan berkembang maka urbanisasi akan berkurang dan masyarakat desa yang meninggalkan desanya pun bisa kembali ke desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa dengan adanya dana desa ini nantinya akan bisa menekan urbanisasi dan masyarakat dapat membangun daerahnya masing-masing. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp72 Triliun (Purnamasari, 2020).

Faktor penyebab utama mengapa penduduk desa melakukan urbanisasi adalah kurangnya lapangan pekerjaan di desa. Sejalan dengan kebijakan dana desa dalam menanggulangi kemiskinan pun dana desa diprioritaskan untuk padat karya tunai yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja serta menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, serta keluarga miskin. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa penggunaan dana desa untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) telah menyerap 2.225.624 tenaga kerja dan dari jumlah tersebut sebanyak 925.675 pekerja adalah pekerja dari keluarga miskin kemudian sisanya 622.929 pekerja adalah pengangguran (Natalia,

2021). Menurut Abdul Halim Iskandar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dana desa di tahun 2021 telah menyerap jutaan tenaga kerja, pada tahun 2021 banyak sekali masyarakat yang terdampak dan banyak yang menganggur. Pemerintah dalam mengatasi pengangguran juga mendirikan lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDes. Kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang ditampung dalam badan usaha yang kemudian dikelola secara profesional tetapi tetap menonjolkan potensi dari suatu desa tersebut dan menjadikan usaha di desa tersebut menjadi lebih produktif dan efektif merupakan cara kerja dari BUMDes (Darwita & Redana, 2018).

Dana desa yang relatif besar seharusnya dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik mungkin. Hal ini membuat pemerintah mempersiapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mendukung akuntabilitas dana desa diantaranya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Kemenkeu RI, 2019). Peraturan-peraturan tersebut bukan untuk mempersulit pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, namun peraturan tersebut ditetapkan agar pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemajuan desa.

Desa Wonosari dan Desa Bomerto setiap tahunnya selalu menerima dana desa yang bersumber dari dana transfer dalam APBDDes. Alasan ingin meneliti di Desa Wonosari dan Desa Bomerto adalah pertama, belum adanya penelitian di Desa Wonosari dan Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo yang berkaitan dengan peranan dana desa dalam mengatasi ekonomi desa. Kedua, berdasarkan dokumen laporan keuangan Desa Wonosari dan Desa Bomerto pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dana desa menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan terbesar di APBDDes. Ketiga, pemilihan kedua desa tersebut merupakan rekomendasi dari

Kecamatan Wonosobo, yang mana Kecamatan Wonosobo ingin melihat seberapa jauh pelaksanaan dana desa dalam mengatasi ekonomi desa yaitu kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran di Desa Wonosari dan Desa Bomerto.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini akan meneliti tentang peranan dana desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa skripsi ini berjudul ***“Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Kecamatan Wonosobo (Studi Desa Wonosari dan Desa Bomerto)”***.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan dana desa dalam mengatasi ekonomi desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisis peranan dana desa dalam mengatasi ekonomi desa di Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo.
2. Menganalisis peranan dana desa dalam mengatasi ekonomi desa di Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sebagai bahan masukan serta rekomendasi dalam membuat kebijakan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang menganalisa berkaitan dengan dana desa.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai kajian pustaka dan landasan teori yang berkaitan dengan dana desa, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas jenis dan sumber data penelitian, informan, lokasi penelitian, situasi sosial, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data penelitian dan menjelaskan hasil analisis serta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dalam akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat uraian hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya atau terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian-penelitian terdahulu ini nantinya dapat memberikan informasi dan landasan dalam penelitian. Adapun kajian review peneliti-peneliti terdahulu yang digunakan adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Wardoyo Sosro Sujoko, pada tahun 2019 dengan judul **“Efektivitas Program Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Pedesaan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan)”**, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan adanya dana desa di Desa Wonokarto yang digunakan dalam pembangunan pedesaan belum efektif dikarenakan hanya bisa memenuhi empat poin dari lima indikator efektivitas kebijakan. Adapun poin yang sudah terpenuhi adalah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat proses sedangkan poin yang tidak terpenuhi adalah tepat lingkungan khususnya tempat lingkungan eksternal.
2. Jurnal yang ditulis oleh Roland A. Pangke, Anderson G. Kumenaung, dan Josep Bintang Kalangi, pada tahun 2019 yang berjudul **“Efektivitas Peranan Dana Desa terhadap Pendapatan Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro”**, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa diatas 100 persen artinya penggunaan dana desa sangat efektif di daerah penelitian dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dana desa berperan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Torkis Harahap pada tahun 2019 dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tani di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraha Tinggi Kabupaten Padang Lawas”**, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis atau reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini menggunakan enam orang sebagai informan. Hasil pembahasan skripsi ini menjelaskan bahwa dengan adanya dana desa masyarakat Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas sudah ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa ini, oleh karena itu masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh. Pemberdayaan masyarakat tani desa yang dirasakan bahwa kesejahteraan masyarakat telah meningkat dan mempermudah aktivitas masyarakat. Dana desa pun juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, paret baton, gedung serbaguna, mandi cuci kakus (MCK) dan lain sebagainya.
4. Jurnal yang ditulis oleh Tri Angga Sigit pada tahun 2020 dengan judul **“Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia”**, jenis penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dana desa mampu menurunkan jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia. Jadi, kebijakan dana desa ini sudah efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin artinya hal ini sudah sesuai dengan harapan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara terdapat tiga aspek dari kebijakan dana desa yang harus diperbaiki oleh pemerintah yaitu penyempurnaan aspek formulasi, aspek penguatan pengawasan, dan aspek peningkatan inovasi dalam penggunaan dana desa.
5. Jurnal yang ditulis oleh Feiby Vencentia Tangkumat, Vicky V. J. Panelewen, dan Arie D.P. Mirah pada tahun 2017 dengan judul **“Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”**, dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui pengamatan dan

wawancara. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu anggota masyarakat desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa di tujuh desa, setiap desa diambil 10 responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya program dana desa di Kecamatan Pineleng berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat sejak adanya dana desa. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan pertanian. Perlu diperhatikan untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

6. Jurnal yang ditulis oleh Fadli Razzak dan Zuly Qodir pada tahun 2020 dengan judul **“Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Klaten, Jawa Tengah)”**, penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi serta penegasan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Ponggok sudah menggunakan dana desa untuk menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program-program tersebut telah mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. Desa Tegalrejo menggunakan dana desa untuk memperbaiki infrastruktur desa dan pelatihan masyarakat. Desa Kalangan menggunakan dana desanya untuk memperbaiki infrastruktur desa, reboisasi, dan pelatihan serta pembinaan masyarakat. Desa Tegalrejo dan Desa Kalangan adanya kebijakan dana desa belum mampu meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran dikarenakan partisipasi masyarakat kurang dalam mendukung program yang diselenggarakan.
7. Skripsi yang ditulis oleh Wulan Budiningsih pada tahun 2019 dengan judul **“Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)”**, penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Melung melalui pemberdayaan masyarakat dengan dana desa mampu mengurangi kemiskinan dikarenakan dapat menyerap tenaga kerja, mengadakan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan membuat unit wisata yang dapat menyongkong pendapatan asli desa. Setelah adanya dana desa, Desa Melung menjadi desa berkembang dan optimis akan menjadi desa mandiri.

8. Laporan penelitian yang ditulis oleh Cut Badratus Navis bekerja sama dengan BAPPEDA Kota Banda Aceh dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018 dengan judul **“Peran Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh”**, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan hipotesis nol pengelolaan dana desa tidak ada hubungan dengan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh dan hipotesis alternatif pengelolaan dana desa ada hubungan dengan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dana desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh. Adanya dana desa ini telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa yang tidak mempunyai pekerjaan. Meskipun di lapangan pemerataan dalam pembagian kerja masih belum merata.

Berdasarkan berbagai kajian penelitian terdahulu di atas secara ringkas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Keterangan (Nama; Judul; Metode Penelitian)	Hasil	Persamaan	Perbedaan
<p>Wardoyo Sosro Sujoko ; Efektivitas Program Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Pedesaan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ; Metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Kebijakan dana desa di Desa Wonokarto digunakan untuk pembangunan pedesaan belum bisa dikatakan efektif dikarenakan hanya bisa memenuhi empat poin dari lima indikator efektivitas kebijakan.</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif.</p>	<p>Perbedaan dengan peneliti adalah pada objek penelitian.</p>
<p>Roland A. Pangke, Anderson G. Kumenaung, Josep Bintang Kalangi ; Efektivitas Peranan Dana Desa terhadap Pendapatan Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro ; Metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Efektivitas penggunaan dana desa di atas 100% yang artinya penggunaan dana desa sangat efektif di daerah penelitian dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dana desa berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu peneliti tidak membanding- kan efektivitas dari dana desa dengan pendapatan masyarakat.</p>

	mengentaskan kemiskinan.		
Torkis Harahap ; Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ; Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat tani di desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh.	Persamaan dari penelitian ini yaitu pada metode penelitiannya dengan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian yaitu peneliti ini lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.
Tri Angga Sigit ; Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan (Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia) ; Metode penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif.	Dana Desa mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin.	Persamaan terletak pada penelitian ini sama-sama meneliti mengenai dana desa terhadap kemiskinan.	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan peneliti tidak menggunakan metode campuran.
Feiby Vencentia T, Vicky V. J. Panelewan, Arie D. P. Mirah ; Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan	Setelah adanya program dana desa perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat. Peningkatan ini	Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti.

Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa ; Metode penelitian kualitatif.	disebabkan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan pertanian.		
Fadli Razzah & Zuly Qodir ; Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Pongkok, Desa Tegalorejo, dan Desa Kalangan, Klaten, Jawa Tengah) ; Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Kegiatan yang diselenggarakan menggunakan dana desa berupa pengadaan bantuan peralatan di Desa Pongkok terbukti dapat memperluas lapangan pekerjaan, sehingga menurunkan jumlah pengangguran di desa.	Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti.
Wulan Budiningsih ; Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten	Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Melung melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Desa	Persamaan terletak pada metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama meneliti dana desa dalam	Perbedaan terletak pada daerah yang diteliti dan peneliti menggunakan dua desa dalam penelitian.

Banyumas) ; Metode penelitian deskriptif kualitatif.	Melung, karena menyerap tenaga kerja, mengadakan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan membuat unit wisata, yang bisa menyokong pendapatan asli desa.	mengatasi kemiskinan.	
Cut Badratus Navis ; Peran Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh ; Metode penelitian kuantitatif.	Dana desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh. Adanya dana desa ini telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa yang tidak mempunyai pekerjaan. Meskipun di lapangan pemerataan dalam pembagian kerja masih belum merata.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai peran dana desa dalam mengatasi pengangguran di desa.	Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan tabel kajian pustaka terdahulu dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Wulan Budiningsih dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)”, Fadli Razzak & Zuly Qodir dengan judul “Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, dan Cut Badratus Navis yang

berjudul “Peran Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh” , dikarenakan judul-judul dari penelitian-penelitian tersebut mencakup ekonomi desa yaitu kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan sumber informasi dalam penelitian ini. Persamaan dengan penelitian-penelitian tersebut adalah metode penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kualitatif deskriptif kecuali laporan yang ditulis oleh Cut Badratus Navis dikarenakan menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Peranan dana desa sendiri dalam mengatasi ekonomi perdesaan adalah objek dalam penelitian yang akan diteliti.

2.2 Landasan Teori

1. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Salah satu strategi pemerintah dalam pembangunan negara melalui program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan meningkatkan pembangunan desa. Kebijakan dana desa adalah bentuk implementasi dari strategi pemerintah dalam membangun negara. Dana desa ini adalah salah satu pendapatan transfer desa yang bersumber dari APBN, dimana penggunaannya terintegrasi dengan APBDes. Dana desa ini merupakan kebijakan pemerintah dengan sumber dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu RI, 2019).

b. Tujuan Dana Desa

Tujuan dilaksanakan kebijakan dana desa antara lain adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan (Kemenkeu RI, 2019). Kelima tujuan tersebut diharapkan desa dapat mengalokasikan dana desanya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahunnya

ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

c. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dimana pada tahap ini dilakukan penentuan serta persiapan suatu tujuan seperti menetapkan program serta tahapan untuk mencapai suatu tujuan (Sujoko, 2019). Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan kebijakan dana desa, pemerintah desa harus melakukan perencanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan dengan dana desa. Adapun perencanaan penggunaan dana desa sebagai berikut :

- 1) Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa atau yang disingkat Musrenbangdes merupakan perencanaan kegiatan yang didasarkan pada prioritas kebutuhan yang diselenggarakan pemerintah. Musrenbangdes ini dilaksanakan pada bulan Juli dengan mengundang tokoh agama, tokoh adat, BPD, seluruh lapisan masyarakat desa, dan camat sebagai pembina desa.
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa ini memuat evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program desa maupun kegiatan-kegiatan desa. Proses penyusunan RKP Desa dilakukan paling lama bulan September sebelum tahun anggaran.
- 3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau RAPBDesa. RAPBDesa disusun setelah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) selesai. RAPBDesa ini diusulkan kepada bupati melalui camat yang nantinya RAPBDesa akan dipaparkan oleh pemerintah desa kepada camat yang kemudian dilakukan evaluasi oleh camat, selanjutnya apabila disetujui akan disahkan menjadi APBDesa.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBDesa adalah sumber pendapatan dan biaya kegiatan desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBDesa (Hulu & Nasution, 2018). APBDesa ini disusun setelah camat melakukan evaluasi dan klarifikasi terkait RAPBDesa.

d. Prioritas Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada Bab 2 Pasal 5 menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Pengawasan dan pembinaan dana desa telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada Bab 5 Pasal 19 yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa secara nasional. Pembinaan tersebut dengan memberikan pedoman, standar, fasilitasi bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Pengawasan sendiri dilaksanakan dengan maksud pencapaian efektivitas dana desa selain itu sebagai bahan perumusan kebijakan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Menteri melakukan pengawasan dana desa yang dibantu oleh gubernur, bupati/walikota, dan camat.

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut Bappenas (2005) kemiskinan adalah kondisi dimana tidak mempunyai seseorang ataupun sekelompok orang dalam memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Keterbatasan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan, maupun pangan pun dianggap sebagai tanda dari kondisi kemiskinan.

b. Penyebab Kemiskinan

Aspek sosial dan ekonomi menjadi analisis penyebab kemiskinan karena kedua aspek tersebut saling berkaitan. Penyebab kemiskinan dari aspek ekonomi seperti akses lapangan pekerjaan yang rendah kemudian penyebab

kemiskinan dari aspek sosial seperti akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang rendah (Usmaliadanti, 2011).

c. Program Pengentasan Kemiskinan

Pada kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk tim transisi di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono. Salah satu rekomendasi tim transisi adalah pembentukan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (Kominfo RI, 2011). Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2011) ada tiga instrumen utama penanggulangan kemiskinan yaitu :

1) Klaster I

Pada Klaster I ini penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Program pada Klaster I yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Klaster II

Pada Klaster II penanggulangan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin. Program pada Klaster II yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

3) Klaster III

Penanggulangan kemiskinan pada Klaster III yaitu dengan memberdayakan usaha ekonomi mikro dan kecil. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi pelaku usaha berskala mikro kecil. Adapun program pada Klaster III yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Urbanisasi

a. Pengertian Urbanisasi

Urbanisasi dikenal dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Menurut ilmu lingkungan dalam (Harahap F. R., 2013) urbanisasi diartikan

sebagai proses pengkotaan suatu wilayah. Pengkotaan ini diartikan sebagai suatu perubahan sosial, ekonomi dan budaya dikarenakan adanya percepatan daerah ekonomi. Pengkotaan juga diartikan sebagai adanya penarikan di kota yang membuat penduduk dari desa pindah ke kota misalnya kesempatan kerja.

b. Faktor Penyebab Urbanisasi

Penyebab urbanisasi dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik urbanisasi yaitu :

- 1) Anggapan penduduk desa bahwa di perkotaan lapangan pekerjaan mudah didapat dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi.
- 2) Fasilitas di perkotaan seperti pendidikan dan kesehatan yang lengkap.

Faktor pendorong urbanisasi yaitu :

- 1) Tingginya kemiskinan di desa membuat penduduk desa ingin meningkatkan taraf hidupnya dengan berpindah ke kota.
- 2) Kesempatan kerja di desa lebih rendah daripada di perkotaan.
- 3) Kurangnya fasilitas pendidikan, hal ini menyebabkan penduduk desa berpindah ke kota agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan di desa.

4. Pengangguran

Menurut Yanuar (2009) dalam (EGSA UGM, 2021) pengangguran merupakan kondisi dimana angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi dalam sementara waktu tidak bekerja dan yang tidak bekerja dengan umur lebih dari 15 tahun. Menurut Sadono Sukirno (2012) terdapat dua cara untuk menggolongkan pengangguran yaitu :

A. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

- 1) Pengangguran Normal dan Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat dua atau tiga persen penganggur dari keseluruhan jumlah tenaga kerja maka ekonomi tersebut sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran normal dan

friksional tersebut adalah dua atau tiga persen penganggur dari keseluruhan jumlah tenaga kerja.

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang disebabkan karena siklus bisnis. Dunia bisnis ada kalanya mengalami penurunan permintaan terhadap barang/jasa, penurunan permintaan barang/jasa akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi tenaga kerja bahkan juga bisa menutup perusahaannya oleh sebab itu pengangguran akan bertambah. Pertambahan pengangguran itulah yang dinamakan pengangguran siklikal yang disebabkan karena siklus bisnis.

3) Pengangguran Struktural

Jenis pengangguran ini disebabkan dikarenakan struktur kegiatan ekonomi yang mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi dikarenakan barang lain yang lebih baik, industri atau perusahaan tidak mampu bersaing, teknologi yang maju membuat berkurangnya permintaan atas barang, biaya pengeluaran yang terlalu tinggi.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan penggunaan mesin.

B. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran yang diakibatkan oleh lowongan pekerjaan yang sedikit dibandingkan dengan banyaknya tenaga kerja. Pengangguran terbuka adalah penganggur yang menganggur sepenuh waktu dan secara nyata. Secara sederhananya pengangguran terbuka diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja.

2) Pengangguran Tersembunyi

Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu termasuk pengangguran tersembunyi. Hal ini disebabkan karena suatu perusahaan memiliki banyak pekerja dari yang dibutuhkan oleh sebab itu pekerjaan menjadi tidak efisien.

3) Pengangguran Bermusim

Pengangguran bermusim secara sederhananya adalah pengangguran yang disebabkan karena musim.

4) Setengah Menganggur

Penganggur yang tidak bekerja secara optimal dan umumnya mereka bekerja hanya satu atau dua hari dalam seminggu atau bahkan hanya satu sampai empat jam sehari.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Usaha BUMDes ini merupakan kegiatan ekonomi atau pelayanan umum yang kemudian dikelola secara mandiri oleh BUMDes, kegiatan ini melibatkan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bab 1 Pasal 3 terdapat lima tujuan BUMDes yaitu :

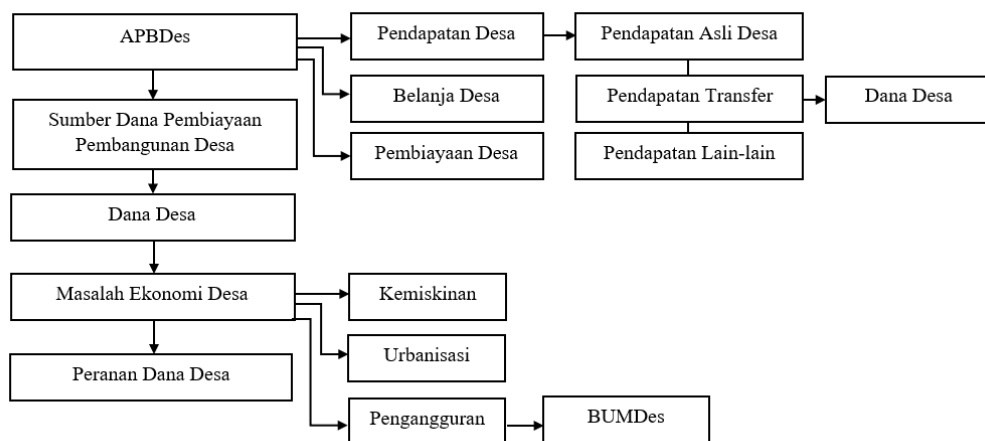
- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi dengan mengelola usaha nantinya akan dapat mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian serta dapat meningkatkan potensi desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum dengan penyediaan barang dan/atau jasa yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta dapat mengelola lumbung pangan desa.
- c. Mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- d. Dapat memanfaatkan aset desa untuk menciptakan nilai tambah aset desa.
- e. Ekonomi digital di desa dapat berkembang.

6. Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan, Urbanisasi, dan Pengangguran

Fenomena kemiskinan dan urbanisasi di desa terjadi akibat adanya kesenjangan antara desa dengan kota, misalnya seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia di daerah kota lebih baik jika dibandingkan dengan desa, dan keterbatasan lapangan pekerjaan di pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan lebih rendah

dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antar daerah desa dengan kota yang mengakibatkan penduduk desa memutuskan untuk pindah ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi desa yaitu kemiskinan dan urbanisasi mengeluarkan kebijakan dana desa. Kebijakan dana desa ini sudah dimulai sejak tahun 2015, pemerintah berharap dengan adanya dana desa dapat mengentaskan kemiskinan dan menekan urbanisasi di desa. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian mengatakan bahwa dengan adanya dana desa diharapkan desa dapat membangun daerahnya masing-masing sehingga dapat menekan urbanisasi dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara (Purnamasari, 2020). Adanya dana desa juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat melalui BUMDes yang nantinya akan mengurangi pengangguran di desa. Jadi, kebijakan dana desa ini merupakan cara pemerintah yang diharapkan mampu mengatasi ekonomi desa seperti kemiskinan, urbanisasi serta pengangguran. Pemerintah juga berharap dengan adanya dana desa ini dapat memberdayakan masyarakat melalui BUMDes.

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2011) metode kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk lisan maupun tertulis. Menurut Sugiyono (2016) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti secara rinci dengan cara mempelajari individu, sekelompok orang, maupun suatu kejadian secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis artinya dalam penelitian ini akan melihat gejala yang terjadi di masyarakat (Idrus, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan dari data primer (utama) dan data sekunder (pendukung). Data primer dalam penelitian ini adalah penuturan langsung dari informan yang dipilih dengan wawancara langsung dengan Kasi Pemer Kecamatan Wonosobo, Sekretaris Desa Wonosari, Sekretaris Desa Bomerto, Masyarakat Desa Wonosari, dan Masyarakat Desa Bomerto.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari website dan data tertulis dari informan. Data sekunder ini digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, 29 kelurahan, dan 236 desa. Kecamatan Wonosobo merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Wonosobo terdiri dari 7 desa dan 13 kelurahan dengan luas wilayah 3,39 persen dari luas Kabupaten Wonosobo atau 3.237,646 ha dengan ketinggian wilayah rata-rata 772 m di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Wonosari dan Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di dua desa yang terletak di Kecamatan Wonosobo karena

tersedianya data untuk memecahkan masalah dalam penelitian, lokasi mudah dijangkau sehingga dapat memudahkan proses penelitian, dan merupakan rekomendasi dari Kecamatan Wonosobo.

3.3. Situasi Sosial

Istilah populasi dan sampel pada penelitian kualitatif tidak digunakan, dalam penelitian kualitatif. Istilah yang lazim digunakan adalah situasi sosial (*social situation*). Menurut Sugiyono (2016) situasi sosial merupakan keselarasan antara tempat, pelaku serta aktivitas yang saling berinteraksi. Penggunaan situasi sosial ini dapat mengamati secara mendalam mengenai aktivitas orang-orang di tempat tertentu. Situasi sosial dalam penelitian ini adalah tujuh desa di Kecamatan Wonosobo dan fokus utama dalam penelitian ini adalah dua desa di Kecamatan Wonosobo yaitu Desa Wonosari dan Desa Bomerto.

3.4. Informan

1. Pengertian Informan dan Jenis Informan

Informan didefinisikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Terdapat tiga jenis informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Informan yang memiliki informasi secara menyeluruh dan memahami secara garis besar permasalahan yang diteliti adalah informan kunci. Informan utama merupakan informan yang lebih mengetahui secara teknis dan detail permasalahan dalam penelitian. Jika diibaratkan informan utama ini seperti aktor utama dalam cerita. Informan yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian adalah informan pendukung (Saniya, 2021).

Tiga informan dalam penelitian ini yaitu pertama, informan kunci adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo. Kedua, informan utama adalah Sekretaris Desa Wonosari dan Sekretaris Desa Bomerto, dan ketiga informan pendukung adalah masyarakat di Desa Wonosari dan masyarakat di Desa Bomerto.

2. Jumlah Informan

Tidak ada aturan mengenai jumlah minimal sampel dalam penelitian kualitatif, apabila dalam penelitian telah memperoleh kecukupan dalam perolehan

pengumpulan data atau perolehan informasi maka penelitian sudah dapat dihentikan. Terdapat lima jumlah informan dalam penelitian ini yaitu satu informan kunci, dua informan utama, dan dua informan pendukung.

3. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya (Saleh, 2017). Artinya informan yang dipilih dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dalam fenomena penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Kegiatan mengamati secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian dalam mengumpulkan data merupakan observasi dalam penelitian. Penelitian ini mengamati fenomena yang terjadi di desa-desa di Kecamatan Wonosobo. Fenomena yang diamati adalah masalah ekonomi desa yaitu kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran di Desa Wonosari dan Desa Bomerto.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam atau *in-depth interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang artinya berkomunikasi secara langsung dengan informan agar memperoleh informasi yang lengkap serta mendalam yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2014) wawancara dapat dilakukan secara *face to face* (tatap muka) maupun menggunakan telepon. Penelitian ini melakukan wawancara mendalam atau *in-depth interview* dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo, Sekretaris Desa Wonosari, Sekretaris Desa Bomerto, masyarakat Desa Wonosari, dan masyarakat Desa Bomerto.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014) dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun macam-macam bentuk dokumen yaitu sejarah kehidupan, biografi, foto, film, sketsa, dan lain-lain. Dokumen ini sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini dokumentasi berasal dari

data-data pencatatan keuangan di Desa Wonosari dan Desa Bomerto serta data-data dari Kecamatan Wonosobo.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif merupakan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi yang kemudian dirangkum dan ditajamkan yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh M. Idrus (2009) analisis data kualitatif dilakukan setelah data-data yang diperlukan terkumpul yang selanjutnya dilakukan proses membaca, mempelajari serta menelaah data.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan *software* Nvivo 12 Plus. Aplikasi Nvivo dikembangkan pada tahun 1981 oleh programmer yang bernama Tom Richards dengan nama NUD'IST atau *Non-Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing*. Pada tahun 2002 NUD'IST ini diganti menjadi Nvivo dimana "N" merupakan singkatan dari NUD'IST dan "Vivo" diambil dari "in-vivo" yang memiliki arti kegiatan mengkodekan berdasarkan data yang diambil di lapangan. Jadi, dalam aplikasi Nvivo ini peneliti melakukan coding yang hasilnya berbentuk tabel, mindmap, grafik, diagram. Aplikasi Nvivo ini merupakan aplikasi penelitian kualitatif dengan melakukan coding terhadap sumber data yang diperoleh pada saat penelitian (Haryati & Suciptaningsih, 2017).

3.7. Uji Keabsahan Data

Apabila nantinya dalam penelitian tidak terjadi perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang terjadi sesungguhnya, dapat membuktikan bahwa proses penelitian tersebut benar-benar dilakukan maka data tersebut valid. Pembuktian validitas ini ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan agar validitas data dapat terpenuhi yaitu dengan memperpanjang observasi, melakukan pengamatan secara terus menerus, triangulasi, dan lain sebagainya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi. Menurut Norman K. Denkin dalam (Saniya, 2021) triangulasi terdiri dari empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (penelitian yang dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan

triangulasi teori. Adapun penjelasan mengenai triangulasi-triangulasi tersebut sebagai berikut :

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan apabila data atau informasi yang didapat dari informan diragukan kebenarannya, maka penelitian tersebut dapat mencari informan yang berbeda dengan tujuan untuk membuktikan kebenarannya.

2. Triangulasi Antar-peneliti

Penelitian yang dilakukan secara kelompok maka dapat menggunakan triangulasi ini. Pengumpulan data dan analisis data dalam triangulasi antar-peneliti ini menggunakan lebih dari satu orang. Kita juga harus memastikan bahwa orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam pencarian data mendalam harus memiliki pengalaman penelitian agar nantinya tidak menimbulkan masalah baru dalam penelitian serta tidak merugikan peneliti yang lain.

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi jenis ini dilakukan dengan cara mencari tahu kebenaran dari informasi yang dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber perolehan data. Sumber perolehan data penelitian selain melalui wawancara dan observasi juga dapat menggunakan dokumen tertulis hingga foto atau gambar. Cara-cara tersebut nantinya akan menghasilkan data atau bukti yang berbeda dan dapat memberikan pandangan mengenai fenomena penelitian.

4. Triangulasi Teori

Pada triangulasi teori bentuk hasil akhir penelitian kualitatif ini bisa berupa rumusan informasi. Triangulasi teori menggunakan informasi yang dibandingkan dengan teori yang relevan untuk menghindari bias atau prasangka atas temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua kombinasi triangulasi sebagai uji keabsahan data yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Pada triangulasi sumber data dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo, Sekretaris Desa Wonosari, Sekretaris Desa Bomerto dan dalam membuktikan informasi tersebut dilakukan wawancara

mendalam kepada masyarakat Desa Wonosari dan masyarakat Desa Bomerto. Pada triangulasi teori dalam penelitian ini dengan membandingkan informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Pada penelitian-penelitian sebelumnya ini dijadikan sebagai sumber sehingga dapat menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.



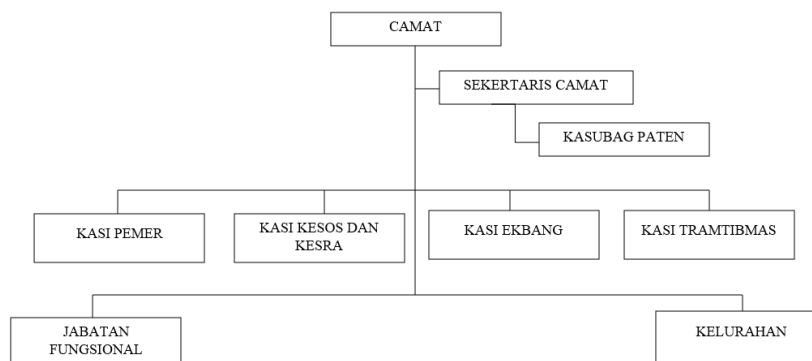
BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

A. Kecamatan Wonosobo

Terletak di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 15 kecamatan, 29 kelurahan, dan 236 desa merupakan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara, serta di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Kecamatan Wonosobo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Secara geografis luas wilayah Kecamatan Wonosobo adalah 3,39 persen dari luas Kabupaten Wonosobo atau 3.237,646 ha dengan ketinggian wilayah rata-rata 772 m diatas permukaan laut. Sebagian besar mata pencaharian di Kecamatan Wonosobo berasal dari sektor industri sebanyak 282 usaha skala besar, sedang, kecil maupun rumah tangga. Secara administrasi Kecamatan Wonosobo berbatasan langsung dengan Kecamatan Mojotengah di sebelah utara, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Selomerto di sebelah timur, Kecamatan Selomerto di sebelah selatan, dan Kecamatan Watumalang di sebelah barat. Kecamatan Wonosobo terdiri dari 7 desa dan 13 kelurahan terbagi menjadi 81 dusun/lingkungan yang terdiri dari 145 RW dan 655 RT (Kecamatan Wonosobo, 2021).



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wonosobo

B. Desa Wonosari

Sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 Desa Wonosari terdiri dari 4 dusun yang memiliki sejarah masing-masing sebelum bergabung menjadi Desa Wonosari. Dusun Bangsri didirikan oleh Mbah Kyai Putih yang merupakan seorang kyai pertapa. Beliau membuka alas dan mendirikan rumah serta tempat pengajian yang kemudian napak tilas tersebut menjadi sebuah perkampungan bernama Dusun Bangsri. Dusun Kebumen didirikan dengan perjuangan seorang tokoh yang sangat disegani dan bijaksana yang bernama Mbah Kyai Tanggul Angin. Dusun Wonokerso didirikan oleh Mbah Kyai Jogoreso yang merupakan seorang kyai sekaligus musafir. Terakhir adalah Perumahan Wonosari Indah, nama ini diberikan karena Perumahan Wonosari Indah ini dahulu adalah lahan persawahan di Desa Wonosari (Desa Wonosari, 2021).

Desa Wonosari merupakan salah satu dari 7 desa di Kecamatan Wonosobo yang terletak pada garis bujur 109,92 dan garis lintang -7,35. Desa Wonosari terdiri dari 3 dusun dan 1 perumahan yaitu Dusun Bangsri, Dusun Kebumen, Dusun Wonokerso, dan Perumahan Wonosari Indah. Jarak Desa Wonosari dari Kota Kecamatan Wonosobo adalah 3 km dengan luas wilayah 193,96 ha yang terdiri dari luas tanah sawah 53,96 ha, luas tanah kering 125 ha, luas fasilitas umum 15 ha. Desa Wonosari berbatasan langsung dengan Desa Bomerto di sebelah timur, Kelurahan Jlamprang di sebelah barat, di sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Candirejo, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Pagerkukuh.

Jumlah penduduk Desa Wonosari pada tahun 2019 tercatat sebesar 2.481 jiwa yang terdiri dari 1.250 laki-laki dan 1.231 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 766 KK. Persentase perkembangan penduduk di Desa Wonosari pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,96 persen laki-laki dan 6,21 persen perempuan. Jumlah angkatan kerja yaitu penduduk usia 18-56 tahun sebanyak 286 orang. Pertumbuhan penduduk di Desa Wonosari tergolong rendah hanya 1,74 persen pertahunnya dan Desa Wonosari termasuk desa dengan angka kelahiran rendah di Kecamatan Wonosobo. Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Wonosari:

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Wonosari

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	8 orang
2.	Buruh Tani	190 orang
3.	Pemilik Usaha Tani	68 orang
4.	Karyawan Perusahaan Perkebunan	3 orang
5.	Buruh Perkebunan	76 orang
6.	Pemilik Usaha Perkebunan	35 orang
7.	Peternakan Perorangan	18 orang
8.	Buruh Usaha Peternakan	20 orang
9.	Pemilik Usaha Peternakan	98 orang
10.	Montir	7 orang
11.	Tukang Batu	94 orang
12.	Tukang Jahit	17 orang
13.	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	56 orang
14.	Karyawan Perusahaan Swasta	10 orang
15.	Karyawan Pemerintahan	10 orang
16.	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	5 orang
17.	Buruh Perdagangan Hasil Bumi	13 orang
18.	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	10 orang
19.	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran	1 orang
20.	Wiraswasta Lainnya	16 orang

Sumber : (Desa Wonosari, 2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling banyak di Desa Wonosari adalah buruh tani dengan jumlah 190 orang. Pemilik usaha peternakan merupakan pekerjaan masyarakat kedua terbanyak di Desa Wonosari dengan jumlah 98 orang. Tukang batu merupakan pekerjaan masyarakat ketiga terbanyak di Desa Wonosari dengan jumlah 94 orang. Mata pencaharian masyarakat Desa Wonosari yang menduduki paling rendah adalah pemilik usaha warung, rumah makan, dan restoran dengan jumlah 1 orang.

Desa Wonosari mempunyai sumber air yang melimpah yaitu Mata Air Leler atau Mata Air Seribu, mata air ini dimanfaatkan para warga untuk mengairi lahan persawahan. Berikut adalah susunan organisasi Pemerintah Desa Wonosari :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Wonosari

C. Desa Bomerto

Desa Bomerto merupakan salah satu dari 7 desa di Kecamatan Wonosobo. Desa Bomerto terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Bomerto, Dusun Wonojoyo, dan Dusun Larangan. Desa Bomerto terletak kurang lebih 5 km dari pusat kota kecamatan. Luas wilayah Desa Bomerto adalah 235 ha yang terdiri dari tanah kering seluas 112,94 ha, tanah sawah seluas 90,49 ha, fasilitas umum seluas 22,23 ha, dan tanah hutan seluas 9,34 ha. Desa Bomerto berbatasan langsung dengan Desa Tlogojati di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Sariyoso, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumireso, Kelurahan Rojoimo, dan berbatasan langsung dengan Desa Wonosari di sebelah barat (Desa Bomerto, 2021).

Kondisi ekonomi di Desa Bomerto hampir sebagian masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan mata pencaharian sehari-hari. Hampir 40 persen lahan di Desa Bomerto merupakan lahan persawahan oleh sebab itu sebagian besar penduduk Desa Bomerto bermata pencaharian sebagai petani. Adapun sektor lain yang menunjang ekonomi masyarakat di Desa Bomerto yaitu sektor perdagangan, sektor peternakan, dan sektor kerajinan atau pertukangan.

Jumlah penduduk di Desa Bomerto yang tercatat pada tahun 2020 sejumlah 4.119 yang terdiri dari 2.128 laki-laki dan 1.991 perempuan. Berikut data mata pencaharian di Desa Bomerto :

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bomerto

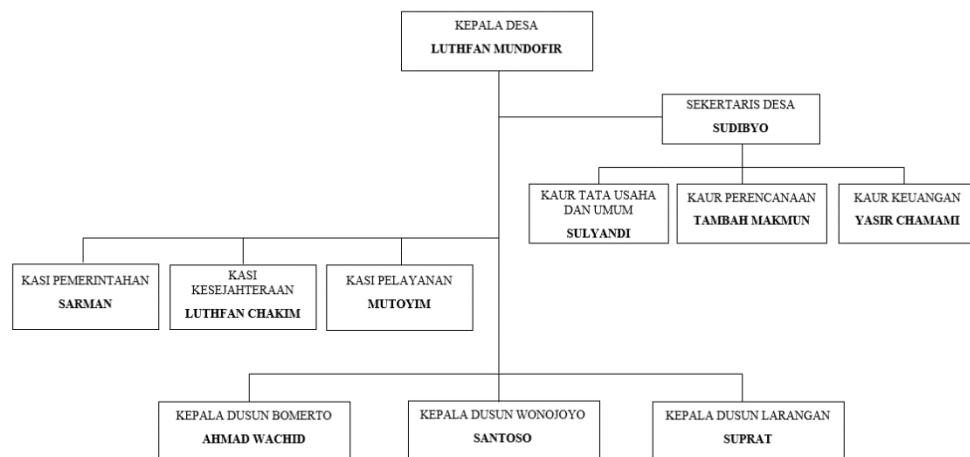
NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	361 orang
2.	Buruh Tani	76 orang
3.	Peternakan Perorangan	46 orang
4.	Buruh Usaha Peternakan	13 orang
5.	Penambang Galian C Perorangan	1 orang
6.	Montir	1 orang
7.	Tukang Batu	90 orang
8.	Tukang Jahit	5 orang
9.	Tukang Kue	9 orang
10.	Tukang Rias	3 orang
11.	Karyawan Perusahaan Swasta	264 orang
12.	Karyawan Pemerintahan	3 orang
13.	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	4 orang
14.	Buruh Perdagangan Hasil Bumi	4 orang
15.	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	1 orang
16.	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	4 orang
17.	Pegawai Negeri Sipil	21 orang
18.	POLRI	6 orang
19.	Bidan Swasta	1 orang
20.	Pengacara	1 orang
21.	Pembantu Rumah Tangga	27 orang
22.	Sopir	3 orang

Sumber : (Desa Bomerto, 2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sejumlah 361 orang bekerja sebagai petani, hal ini sesuai dengan kondisi alam yang ada di Desa Bomerto karena

hampir 40 persen lahan yang ada di Desa Bomerto adalah persawahan terlebih kondisi tanah di Desa Bomerto subur. Peringkat kedua dengan mata pencaharian terbanyak di Desa Bomerto adalah karyawan perusahaan swasta sebanyak 264 orang, hal ini dikarenakan letak Desa Bomerto dekat dengan pabrik kayu yang jumlahnya tidak hanya 1 pabrik. Peringkat ketiga dengan mata pencaharian terbanyak adalah tukang batu yaitu 90 orang, hal ini juga dikarenakan letak Desa Bomerto dekat dengan lahan tambang batu.

Lahan pertanian yang bagus merupakan potensi dari Desa Bomerto, terbukti hampir sebagian masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan mata pencaharian sehari-hari. Lahan pertanian di Desa Bomerto sangat cocok untuk ditanami sayuran dan tanaman hortikultura. Desa Bomerto juga memiliki potensi desa wisata yaitu adanya Curug Siaren atau yang dikenal dengan Curug Perawan Kembar. Desa Bomerto juga memiliki sumber air yang terletak di sebelah barat Dusun Wonojoyo yang menjadi bendungan, air bendungan tersebut dimanfaatkan para masyarakat desa untuk mengairi persawahan. Berikut adalah struktur organisasi Pemerintah Desa Bomerto :



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Wonosari

D. Identifikasi Informan

1. Informan 1

Informan kunci dalam penelitian ini merupakan informan pertama, beliau adalah Bapak Randi Ramadhan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Wonosobo. Informan kunci atau informan pertama ini memiliki latar belakang pendidikan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), terbukti bahwa penerapan ilmunya pada posisi saat ini. Saat ini beliau berusia 28 tahun dan sudah menjadi PNS sejak tahun 2016, terhitung beliau sudah 6 tahun menjadi PNS. Beliau bekerja menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo sejak bulan Agustus 2021, sebelumnya beliau bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo.

2. Informan 2

Informan kedua dalam penelitian ini adalah informan utama yaitu Sekretaris Desa Wonosari, Ibu Sandia Rini. Beliau menjadi Sekretaris Desa Wonosari sejak tahun 2018 yang berarti beliau sudah 3 tahun menjabat sebagai sekretaris desa, beliau terkenal rajin dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terbukti bahwa Desa Wonosari selalu menyelesaikan RKP Desa hingga APBDesa paling awal. Pendidikan terakhir beliau adalah lulusan Program Sarjana Teknik Elektro Universitas Indonesia. Usia beliau saat ini adalah 29 tahun.

3. Informan 3

Informan ketiga dalam penelitian ini adalah informan utama yaitu Sekretaris Desa Bomerto Bapak Sudibyo. Beliau bekerja sebagai perangkat desa sudah 11 tahun terbukti bahwa beliau sudah sangat menguasai permasalahan pada penelitian. Pendidikan terakhir beliau adalah lulusan Program Sarjana Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU Yogyakarta. Saat ini usia beliau adalah 39 tahun.

4. Informan 4

Informan keempat dalam penelitian ini merupakan informan pendukung, beliau bernama Ibu Towilah. Ibu Towilah bekerja sebagai penjahit selama 8 tahun dan saat ini beliau berusia 41 tahun. Ibu Towilah sangat aktif dalam organisasi desa beliau menjadi Kader PPKBD, Kader Posyandu, dan menjadi pengurus Muslimat Fatayat. Pendidikan terakhir beliau adalah lulusan SD Wonosari, saat ini beliau sedang mengikuti pendidikan kejar Paket C yang diadakan oleh Pemerintah Desa Wonosari.

5. Informan 5

Informan kelima dalam penelitian ini merupakan informan pendukung, beliau adalah Ibu Iryawati. Ibu Iryawati memiliki usaha warung yang terletak di Dusun Larangan RT 01 RW 03 Desa Bomerto. Kegiatan sehari-hari beliau adalah berdagang jajanan dan kebutuhan rumah tangga, beliau juga memiliki rumah produksi pembuatan jajanan khas Wonosobo yaitu petos, selain itu beliau juga memproduksi berbagai makanan kering lainnya. Pendidikan terakhir beliau adalah lulusan SMP, beliau juga aktif dalam organisasi desa dengan menjadi Kader PPKBD dan Kader Posyandu. Beliau sudah 10 tahun menjadi wirausaha, saat ini beliau berusia 39 tahun.

4.2 Hasil Analisa Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu Desa Wonosari dan Desa Bomerto yang terletak di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan dana desa dalam mengatasi ekonomi desa yaitu kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yaitu Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo sebagai informan kunci, Sekretaris Desa Wonosari dan Sekretaris Desa Bomerto sebagai informan utama, dan masyarakat Desa Wonosari dan masyarakat Desa Bomerto masing-masing satu orang sebagai informan pendukung. Penelitian ini juga menggunakan *software* Nvivo 12 Plus dalam menganalisis data penelitian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara nasional pemerintah menganggarkan dana desa dalam APBN setiap tahunnya, tujuan dari adanya kebijakan dana desa adalah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di desa. Kegiatan maupun program yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa dengan dana desa diharapkan dapat menciptakan perubahan bagi masyarakat khususnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Wonosari dan Desa Bomerto jika dibandingkan lebih maksimal di Desa Wonosari daripada di Desa Bomerto. Terbukti pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wonosari tahun 2018-2021 bahwa bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pada sub bidang penanaman modal (BUMDes) dan sub bidang perdagangan dan industri selalu dianggarkan setiap tahunnya. Berikut tabel rincian penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Wonosari dan Desa Bomerto :

Tabel 4.5 APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosari

No	Kegiatan/Program	Anggaran	Tahun
1.	Kegiatan Penyertaan Modal BUMDes	Rp35.611.000	2018
2.	Penanaman Modal BUMDes	Rp43.490.000	2019
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Rp17.000.000	2020
4.	Pengembangan Industri kecil level Desa	Rp4.000.000	2021

Sumber : (Desa Wonosari, 2021)

Tabel 4.6 APBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bomerto

No	Kegiatan/Program	Anggaran	Tahun
1.	Pembentukan BUMDes (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes)	Rp6.000.000	2019
2.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Rp20.000.000	2020

Sumber : (Desa Bomerto, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Wonosari telah memaksimalkan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat, berbeda dengan Desa Bomerto yang belum memaksimalkan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat. Desa Wonosari melaksanakan program pada bidang

pemberdayaan masyarakat di setiap tahunnya berbeda dengan Desa Bomerto yang hanya melaksanakan dua tahun saja yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Pengelolaan dana desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo dibagi menjadi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut penjelasan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah :

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo, Sekretaris Desa Wonosari, Sekretaris Desa Bomerto perencanaan dibagi menjadi lima tahapan yaitu musyawarah dusun, musyawarah desa, RKP Desa, RAPBDes, dan APBDes. Menurut Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari, dana desa termasuk dalam APBDes yaitu pendapatan transfer, oleh sebab itu proses perencanaannya sama seperti APBDes. Adapun tahapan perencanaan sebagai berikut :

a) Musyawarah Dusun (Musdus)

Musdus atau musyawarah dusun merupakan tahap awal dalam perencanaan pembangunan desa. Melalui musdus diharapkan masyarakat dapat memberikan aspirasi mengenai program atau kegiatan apa saja yang diinginkan oleh masyarakat dusun. Proses dalam musdus ini awalnya kepala dusun mengumpulkan para warganya untuk membahas mengenai kegiatan atau program apa yang menjadi prioritas di dusun tersebut yang nantinya akan diusulkan kepada kepala desa dalam musyawarah desa (mudes).

b) Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes atau musyawarah desa yang dilaksanakan pada awal tahun setelah dilaksanakannya musyawarah dusun (musdus). Musdes dihadiri oleh kelompok masyarakat, RT, RW, BPD, disabilitas, tokoh pendidik, dan semuanya yang telah ditetapkan dalam pedoman RKP kabupaten ke desa (Rini, 2021). Melalui musdes akan ditentukan kegiatan atau program mana yang akan dilaksanakan dan yang menjadi prioritas.

c) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Penyusunan RKP Desa merupakan tahap ketiga dalam perencanaan dana desa, setelah menentukan kegiatan atau program yang menjadi

prioritas desa selanjutnya dimasukkan dalam RKP Desa. RKP Desa juga memuat mengenai rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dalam satu tahun kedepan.

d) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)

RAPBDes disusun setelah pembuatan RKP Desa yang nantinya RAPBDes diusulkan kepada bupati melalui camat, selanjutnya setelah APBDes disetujui oleh bupati, pemerintah desa mengesahkan RAPBDes menjadi APBDes.

e) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan disahkan setelah RAPBDes disetujui oleh bupati. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan dan sumber pendapatan pemerintah desa. Salah satu pendapatan terbesar dalam APBDes adalah pendapatan transfer dana desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dana desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang membidangi dan dibantu oleh TPK atau Tim Pelaksana Kegiatan yang diketuai oleh kepala desa.

3. Pengawasan

Sekretaris Desa Wonosari mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan terkait penggunaan dana desa, setiap kegiatan atau program diserahkan kepada kasi dan kaur yang membidangi. Disesuaikan dengan RAB, menentukan estimasi tanggal untuk kegiatan atau program harus selesai kapan, sesuai dengan *volume* atau tidak, semuanya di kontrol melalui kasi dan kaur yang membidangi. Jadi, kasi dan kaur terjun langsung ke lapangan dan nantinya melakukan laporan terkait kemajuan dari kegiatan atau program yang dilaksanakan. Sekretaris Desa Bomerto juga menambahkan mengenai pengawasan dana desa juga bekerjasama dengan BPD, Kecamatan, Kabupaten, Inspektorat serta BPK. Kabupaten Wonosobo juga telah membuka akses untuk semua masyarakat, bukan hanya masyarakat Wonosobo saja namun seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses ***Open Data Desa*** untuk

dapat melihat APBDes desa-desa di Kecamatan Wonosobo. Hal ini merupakan salah satu asas dari pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi atau keterbukaan. Semua lapisan masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja dana desa digunakan dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan yang ada di lapangan atau tidak dan sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musdes dan musdes atau tidak. Towilah masyarakat Desa Wonosari pun mengatakan bahwa hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat desa terhadap pemerintah desa dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Artinya dana yang digunakan oleh desa jelas pengeluarannya untuk apa.

A. Prioritas Dana Desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto

Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari menyampaikan bahwa yang menjadi prioritas dana desa di Desa Wonosari setiap tahunnya selalu ada untuk pengentasan kemiskinan misalnya seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu rumah yang tidak memenuhi syarat sebagai rumah layak huni yang dinilai dari kondisi bangunannya, membahayakan atau tidak, menyehatkan atau tidak bagi penghuninya. Jambanisasi juga menjadi prioritas dana desa, karena upaya pengentasan kemiskinan salah satunya dengan program jambanisasi. Hal ini termasuk dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yang memang sudah menjadi prioritas dana desa setiap tahunnya. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi prioritas dana desa di Desa Wonosari misalnya adanya kegiatan PKK, Posyandu, dan PAUD dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengurangi *stunting* di Desa Wonosari. Terbukti bahwa Desa Wonosari memiliki angka *stunting* nol artinya tidak ada *stunting* di Desa Wonosari, hal ini juga diungkapkan oleh Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari.

Sudibyo Sekretaris Desa Bomerto juga mengatakan hal serupa dimana prioritas dana desa selalu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Sudibyo juga mengatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang prioritas dana desa lebih fokus dalam pemberdayaan masyarakat namun dalam lapangan juga harus seimbang dengan

pembangunan fisik karena desa yang maju bukan hanya dilihat dari bagaimana masyarakatnya namun juga dilihat dari infrastruktur yang ada di desa.

B. Penggunaan Dana Desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto

Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 Desa Wonosari lebih banyak menggunakan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan desa. Pada APBDesa tahun 2018 Desa Wonosari mendapatkan dana desa sebesar Rp710.661.000 dengan total pendapatan sebesar Rp1.129.262.000 dalam pelaksanaan bidang pembangunan desa menghabiskan dana sebesar Rp547.100.000 sementara untuk bidang pemberdayaan masyarakat menghabiskan dana sebesar Rp231.581.000 dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa lebih banyak digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa (Desa Wonosari, 2018).

Pada tahun 2019 Desa Wonosari mendapatkan dana desa sebesar Rp811.470.000 dengan total pendapatan sebesar Rp1.260.606.130, dana desa yang didapatkan pada tahun 2019 naik sebesar Rp100.809.000. Pada tahun 2019 sebesar Rp733.580.000 dikeluarkan untuk pelaksanaan bidang pembangunan desa seperti pada sub bidang pendidikan ada pembangunan PAUD, program kejar paket, kemudian pada sub bidang kesehatan ada penyelenggaraan posyandu, pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ada pembangunan jalan permukiman, sementara pada sub bidang kawasan permukiman terdapat program pelaksanaan RTLH. Bidang pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2019 menghabiskan dana sebesar Rp94.490.000 dana ini digunakan untuk program pelatihan masyarakat mengenai pengenalan teknologi untuk pertanian serta pemberdayaan perempuan, dan penanaman modal BUMDes (Desa Wonosari, 2019). Pada tahun 2020 melalui APBDes perubahan tahun 2020 dana desa untuk Desa Wonosari sebesar Rp791.380.000 dan total pendapatan sebesar Rp1.286.200.870 jika dibandingkan dengan tahun 2019 dana desa yang diperoleh pada tahun 2020 justru menurun sebesar Rp20.090.000. Hal ini tidak mengurangi pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan

masyarakat (Desa Wonosari, 2020). Pada tahun 2021 Desa Wonosari mendapatkan dana desa sebesar Rp793.818.000 dengan total pendapatan sebesar Rp1.392.400.420 dalam pelaksanaan pembangunan desa menghabiskan dana sebesar Rp826.828.440 untuk sub bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan PAUD, pengelolaan perpustakaan milik desa, fasilitas kejar paket A/B/C. Adapun sub bidang kesehatan penyelenggaraan serta pembangunan posyandu atau polides, pencegahan dan penanggulangan covid-19, serta dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta permukiman ada pembangunan jalan desa, RTLH, dan peningkatan jaringan listrik. Pemberdayaan masyarakat desa menghabiskan dana sebesar Rp60.576.560 untuk program pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan dan pengembangan industri kecil level desa (Desa Wonosari, 2021).

Desa Bomerto pada tahun 2018 mendapatkan dana transfer desa sebesar Rp774.256.000 dengan total pendapatan sebesar Rp1.417.143.000. Pelaksanaan bidang pembangunan desa pada tahun 2018 Desa Bomerto mengeluarkan dana sebesar Rp776.604.990 sementara untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp142.905.000 (Desa Bomerto, 2017). Pada tahun 2019 Desa Bomerto mendapatkan dana transfer desa sebesar Rp905.106.000 dengan total pendapatan sebesar Rp1.439.855.304. Desa Bomerto mengeluarkan dana sebesar Rp822.517.000 untuk pelaksanaan bidang pembangunan desa yaitu sub bidang pendidikan terdiri dari program penyelenggaraan PAUD, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, sub bidang kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan posyandu, pengasuhan BKB, pos pemulihan gizi, fasilitas PMT balita dan lansia, serta pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari pemeliharaan jalan lingkungan, RTLH, pengelolaan sampah desa, dan pengembangan pariwisata tingkat desa. Pada bidang pemberdayaan masyarakat menghabiskan dana sebesar Rp136.000.000 yang digunakan untuk pemeliharaan saluran irigasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanaman modal pembentukan BUMDesa, serta pengadaan perlengkapan gedung olahraga (Desa Bomerto, 2020). Pada tahun 2020 dana desa di Desa Bomerto sebesar Rp1.079.389.000 dengan total pendapatan sebesar Rp1.759.626.700 jika

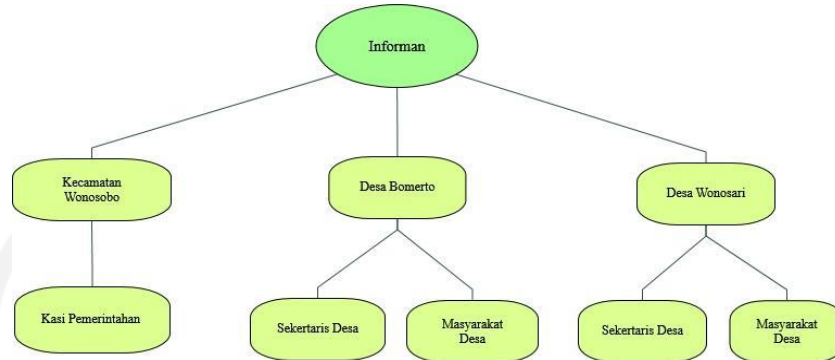
dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019, dana desa tahun 2020 Desa Bomerto sangat meningkat bahkan jika dibandingkan dengan Desa Wonosari, dana transfer desa yang di dapatkan Desa Bomerto sangat tinggi (Desa Bomerto, 2020). Pada tahun 2021 dana desa menurun sebesar Rp188.773.000 menjadi Rp890.616.000 dengan total pendapatan sebesar Rp1.724.840.000. Pada pelaksanaan bidang pembangunan desa menghabiskan dana sebesar Rp1.072.090.000 yang digunakan pada sub bidang pendidikan terdiri dari penyelenggaraan PAUD serta pengelolaan perpustakaan milik desa, pada sub bidang kesehatan terdiri dari penyelenggaraan posyandu, pencegahan dan penanggulangan covid-19. Pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari pemeliharaan jalan lingkungan permukiman, pemeliharaan gedung, pengelolaan sampah, dan peningkatan fasilitas jamban. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa menghabiskan dana sebesar Rp17.597.851 yang digunakan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Desa Bomerto, 2022).

Jika dibandingkan jumlah dana desa justru lebih banyak di Desa Bomerto dibandingkan Desa Wonosari, namun jika disimpulkan penggunaan dana desa di Desa Wonosari sudah sangat maksimal artinya Desa Wonosari sudah memanfaatkan dana desa dengan sebagaimana mestinya yaitu untuk membangun desa dimulai dari infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika dibandingkan dengan Desa Bomerto pemberdayaan di Desa Wonosari jauh lebih maksimal. Dana desa yang didapatkan Desa Bomerto lebih banyak jika dibandingkan dengan Desa Wonosari karena Desa Bomerto lebih luas dan jumlah penduduknya lebih banyak daripada Desa Wonosari.

4.3 Pembahasan

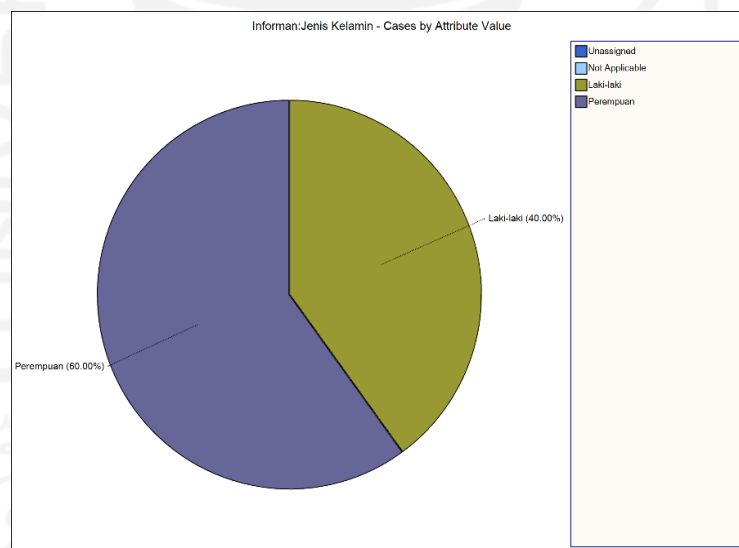
Pada penelitian ini terdapat lima informan yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo, Sekretaris Desa Wonosari, Sekretaris Desa Bomerto, masyarakat Desa Wonosari, dan masyarakat Desa Bomerto. Adapun yang termasuk informan kunci adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo. Informan utama adalah Sekretaris Desa Wonosari dan Sekretaris Desa Bomerto, dan informan pendukung adalah masyarakat di Desa Wonosari dan

masyarakat Desa Bomerto. Berikut gambaran umum mengenai informan dalam penelitian ini :



Gambar 4.4 Gambaran Umum Informan Penelitian

Informan penelitian dari sisi jenis kelamin terdiri dari 60 persen perempuan dan 40 persen laki-laki. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan dari penelitian ini adalah perempuan. Adapun gambar karakter informan berdasarkan jenis kelamin :



Gambar 4.5 Karakter Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah hasil olah data dari hasil wawancara dengan Randi Ramadhan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo terkait dana desa dalam mengatasi ekonomi desa :



Gambar 4.7 Hasil Wawancara Randi Ramadhan Kasi Pemerintahan Kec. Wonosobo

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional yang diprioritaskan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* atau SDGs seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Kedua, untuk program prioritas nasional juga diprioritaskan untuk mencapai SDGs seperti pengembangan desa wisata, pencegahan *stunting* dengan mewujudkan desa tanpa kelaparan. SDGs atau *Sustainable Development Goals* merupakan pencapaian desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan hal ini juga diungkapkan oleh Randi Ramadhan Kasi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo bahwa di dalam indikator pemulihan ekonomi nasional, desa harus mencapai SDGs yang meliputi penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Indikator kemiskinan dapat dilihat jelas melalui tingkat *stunting* yang tinggi dan fasilitas jamban yang masih kurang. Di Kecamatan Wonosobo terdapat dua desa dengan tingkat *stunting* tinggi yaitu Desa Jogoyitnan dan Desa Tlogojati, hal ini tentunya menjadi perhatian untuk pemerintah daerah. Ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Berdasarkan gambar 4.7 dijelaskan bahwa kebijakan dana desa sangat berpengaruh dalam mengatasi kemiskinan contohnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes melalui pengelolaan BUMDes desa-desa bisa menyediakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat seperti memberi pelatihan pada masyarakat. Dana desa juga berperan dalam membangun usaha

ekonomi produktif di desa, dana desa sangat bermanfaat bagi kemajuan suatu desa. Randi Ramadhan Kasi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo juga mengatakan bahwa jika dana desa dihilangkan mungkin desa akan mati, pemerintahan desa pun cenderung lesu dalam memajukan desanya. Artinya bahwa memang dana desa sangat berperan dalam membantu perekonomian desa, dana desa juga merupakan dana transfer terbesar di APBDes. Jadi, dana desa sangat penting bagi berkembangnya suatu desa. Adapun BUMDes yang telah berkembang di Kecamatan Wonosobo yaitu Desa Bomerto dan Desa Wonosari.

Adanya perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dimana dana desa dalam penggunaannya juga untuk program perlindungan sosial berupa BLT DD atau Bantuan Tunai Langsung Dana Desa yang paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani yang paling sedikit 20 persen, serta penanganan covid-19 paling sedikit 8 persen. Hal ini membuat seluruh desa-desa di Kecamatan Wonosobo mengganti RKP Desa tahun 2022, yang mana sebelumnya desa sudah selesai membuat RKP Desa hingga tahapan RAPBDes dan dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan peraturan sebelumnya. Akibat adanya perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 maka seluruh desa mau tidak mau harus mengganti RKP Desa untuk tahun 2022. Hal ini menjadi kendala dari Kecamatan Wonosobo, yang seharusnya pertengahan bulan Desember sudah dilakukan pemaparan atau evaluasi terkait RAPBDes Tahun Anggaran 2022 seluruh desa di Kecamatan Wonosobo tetapi mengalami penundaan dikarenakan desa harus merubah ulang RKP Desa.

4.3.2 Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Desa Wonosari

Desa Wonosari termasuk desa berkembang dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Wonosari juga termasuk desa dengan pemerintahan desa terbaik. Desa Wonosari selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat mulai dari pembangunan infrastruktur desa melalui anggaran dana desa serta pemberdayaan masyarakat di Desa Wonosari, membuat Desa Wonosari

termasuk desa dengan BUMDes yang paling berkembang di Kecamatan Wonosobo. Pemerintah Desa Wonosari dalam melaksanakan pengawasan dana desa terhadap program dan kegiatan yang berlangsung dibantu oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang membidangi. Berikut adalah hasil olah data dari hasil wawancara dengan Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari terkait dana desa dalam mengatasi ekonomi desa di Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo :



Gambar 4.8 Hasil Wawancara Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari Kec. Wonosobo

Berdasarkan gambar di atas kondisi kemiskinan di Desa Wonosari termasuk yang menengah, saat ini hanya terdapat 30 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan menjadi prioritas untuk dituntaskan pada tahun 2022. Dana desa termasuk dalam APBDes yaitu pendapatan dana transfer desa yang jumlahnya 90 persen lebih besar dibandingkan pendapatan yang lain, dimana proses perencanaan dana desa terbagi menjadi lima tahapan yaitu pertama, musyawarah dusun. Musyawarah dusun atau yang disingkat musdus merupakan tahap awal dalam proses perencanaan dana desa dimana dalam musdus para kepala dusun mengumpulkan warganya untuk membahas apa yang menjadi prioritas dusun yang nantinya disampaikan pada musyawarah desa atau musdes. Kedua, musyawarah desa atau musdes yang dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD dan seluruh lapisan masyarakat yang sesuai dengan pedoman RKP kabupaten ke desa. Melalui musdes nantinya akan menetapkan apa yang menjadi prioritas desa. Ketiga, proses selanjutnya setelah musdes dilaksanakan dan menemukan hasil apa saja yang menjadi prioritas desa adalah RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM

Desa selama satu tahun kedepan, RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran desa. Keempat, setelah ditetapkan RKP Desa kemudian pemerintah desa menetapkan RAPBDes yang selanjutnya apabila RAPBDes disetujui oleh bupati maka disahkan menjadi APBDes. Kelima, setelah RAPBDes disetujui dalam rapat pemaparan RAPBDes di kecamatan maka akan disahkan menjadi APBDes.

Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari menyampaikan bahwa setiap tahunnya dalam prioritas penggunaan dana desa, Desa Wonosari selalu memprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan misalnya seperti bantuan RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni dan jambanisasi. Saat ini Desa Wonosari sudah tidak *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, maksudnya adalah masyarakat Desa Wonosari sudah memiliki jamban. Tingkat *stunting* di Desa Wonosari pun sudah nol atau tidak ada *stunting*. Artinya dana desa sudah berperan dalam mengatasi kemiskinan di Desa Wonosari.

Urbanisasi di Desa Wonosari juga termasuk rendah dikarenakan rata-rata penduduk Desa Wonosari adalah petani dan Pemerintah Desa Wonosari dapat membuka lapangan pekerjaan dengan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik atau infrastruktur yaitu program Padat Karya Tunai (PKT) selain itu Pemerintah Desa Wonosari juga berupaya memfasilitasi penduduk desa pada sub bidang pendidikan dengan mengadakan program kejar paket A/B/C dan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi. Pemerintah Desa Wonosari menilai bahwa dengan adanya program-program tersebut nantinya akan meningkatkan kemampuan masyarakat desa serta dapat mengurangi urbanisasi di Desa Wonosari.

Desa Wonosari melalui BUMDes berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa, serta dengan adanya fasilitas kejar paket yang menggunakan dana desa. BUMDes di Desa Wonosari terdiri dari persewaan alat pesta, simpan pinjam walaupun dalam pelaksanaannya masih sebagian masyarakat yang mengikuti, persewaan tralis, pembudidayaan jamur dengan mendirikan rumah jamur tiram, dan pada tahun 2022 Desa Wonosari akan membangun desa wisata, hal ini disampaikan oleh Sandia Rini Sekretaris Desa

Wonosari. Selain urbanisasi yang dapat teratasi dengan pembentukan dan pengembangan BUMDes, angka pengangguran di Desa Wonosari juga dapat teratasi dengan adanya BUMDes. Pengelolaan BUMDes dikelola secara langsung oleh masyarakat Desa Wonosari, artinya bahwa dengan adanya BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan di desa. Adapun usaha lain Pemerintah Desa Wonosari dalam mengatasi pengangguran dengan melibatkan tenaga masyarakat desa dalam pembangunan fisik desa atau program Padat Karya Tunai, selain itu Sandia Rini menyampaikan bahwa di Desa Wonosari terdapat dua toko material yang sudah menjadi langganan pemerintah desa dalam membeli bahan baku untuk pembangunan infrastruktur. Artinya dari semua lapisan di Desa Wonosari itu terbantu dengan adanya dana desa, dari masyarakat yang pengangguran sampai yang memiliki usaha semua merasakan dampak positifnya.

Berdasarkan gambar 4.8 dijelaskan bahwa dana desa sangat berperan dalam mengatasi ekonomi desa, Sandia Rini juga menyampaikan bahwa jika tidak ada dana desa maka kemiskinan di Desa Wonosari tidak dapat teratasi. Dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sementara Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan hanya untuk penyelenggaraan pemerintah desa, maksudnya adalah jika dana desa sepenuhnya untuk membangun desa dan untuk masyarakat desa sedangkan ADD hanya untuk kebutuhan pemerintah desa misalnya kebutuhan ATK.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari, Towilah masyarakat Desa Wonosari juga mengatakan bahwa dengan adanya dana desa, desa sangat terbantu dalam mengatasi ekonomi desa khususnya kemiskinan. Berikut adalah hasil olah data hasil wawancara dengan Towilah masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo :



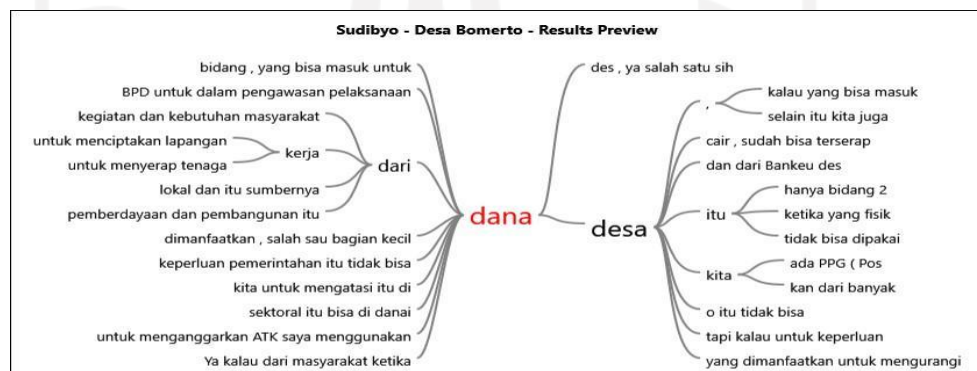
Gambar 4.9 Hasil Wawancara Towilah Masyarakat Desa Wonosari Kec. Wonosobo

Berdasarkan gambar di atas bahwa pemerintah desa telah terbuka kepada masyarakat mengenai APBDDes, dengan adanya *Open Data Desa* yang sangat memudahkan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. Masyarakat desa sangat terbantu dengan adanya *Open Data Desa*, masyarakat bisa mengetahui dana desa untuk apa saja dan berapa Pendapatan Asli Desa (PAD) saat ini. Masyarakat menilai bahwa program-program yang dibuat oleh pemerintah desa dengan dana desa sudah sangat baik terutama pada pembangunan infrastruktur, tetapi pemerintah desa juga harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat karena jika pembangunan fisik saja yang diprioritaskan nantinya fasilitas tersebut akan rusak tetapi jika manusia yang diberdayakan nantinya akan menghasilkan nilai lebih untuk desa sendiri. Masyarakat desa juga sangat mendukung dengan adanya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) seperti pembuatan jamban bagi masyarakat yang tidak mampu, bantuan untuk usaha kecil, dan pembangunan infrastruktur yang dapat memudahkan akses masyarakat. Artinya apa yang disampaikan Sandia Rini dalam wawancara sudah terlaksana karena masyarakat juga mengatakan hal yang sama dalam wawancara. Masyarakat sangat mendukung dengan adanya kebijakan dana desa dikarenakan desa yang tadinya tidak berkembang sekarang bisa berkembang dengan baik, sebelumnya banyak masyarakat menganggur jadi tidak menganggur karena adanya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan fisik. Towilah juga menyampaikan bahwa pemerintah desa harus lebih mengembangkan BUMDes dengan dana desa, apabila nantinya tidak ada dana desa, BUMDes dapat menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dapat membantu maju dan berkembangnya

Desa Wonosari karena nantinya hanya BUMDes dan potensi desa lah yang dapat menambah kekayaan desa, maksud dari kekayaan desa disini adalah Pendapatan Asli Desa Wonosari.

4.3.3 Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Desa Bomerto

Hampir sebagian masyarakat Desa Bomerto mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya. Desa Bomerto termasuk desa dengan kemiskinan tertinggi dikarenakan capaian jamban yang masih rendah. Pada tahun 2019 jamban sehat di Desa Bomerto baru tercapai 17 persen tetapi pada tahun 2021 meningkat menjadi 45 persen artinya capaian jamban sehat di Desa Bomerto mengalami kemajuan sangat baik walaupun belum bisa mencapai 100 persen, hal ini diungkap oleh Sudibyo Sekretaris Desa Bomerto. Rendahnya *stunting* di Desa Bomerto juga didukung dengan adanya Pos Pemulihan Gizi (PPG), dan adanya Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang bertugas merekap *stunting* di Desa Bomerto. Proses perencanaan dana desa di Desa Bomerto sama dengan perencanaan dana desa di Desa Wonosari karena hal ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa. Berikut adalah hasil olah data dari hasil wawancara dengan Sudibyo Sekretaris Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo :



Gambar 4.10 Hasil Wawancara Sudibyo Sekretaris Desa Bomerto Kec. Wonosobo

Berdasarkan gambar di atas bahwa penggunaan dana desa dalam APBDes hanya pada bidang dua yaitu pelaksanaan pembangunan desa dan bidang empat yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tidak bisa digunakan untuk kepentingan operasional pemerintah desa, karena dana untuk

operasional pemerintah desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Sandia Rini Sekretaris Desa Wonosari bahwa dana desa memang ditujukan untuk pembangunan desa dan masyarakat desa. Misalkan untuk menganggarkan ATK pemerintah desa menggunakan dana desa, ini jelas tidak bisa dikarenakan bukan termasuk pembangunan desa ataupun pemberdayaan masyarakat desa, kecuali jika menggunakan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dana ini bisa digunakan untuk operasional pemerintah desa.

Urbanisasi di Desa Bomerto juga termasuk tinggi dikarenakan masih banyak masyarakat desa yang pindah ke kota bahkan ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan (migrasi). Menurut Sudiby Sekertaris Desa Bomerto masih banyak masyarakat yang mencari pekerjaan di luar kota. Salah satu usaha pemerintah desa dalam menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes di Desa Bomerto termasuk BUMDes yang berkembang di Kecamatan Wonosobo setelah Desa Wonosari, BUMDes Desa Bomerto adalah GOR futsal dimana karyawan yang bekerja di GOR futsal tersebut juga berasal dari masyarakat desa. Pemerintah Desa Bomerto berencana akan mengembangkan berbagai unit usaha serta potensi desa wisata yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Tidak hanya BUMDes yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, namun dalam pembangunan fisik, Pemerintah Desa Bomerto selalu menggunakan tenaga atau tukang dari desa Bomerto sendiri, baik menggunakan dana desa maupun bantuan keuangan desa (Bankeudes).

Partisipasi masyarakat Desa Bomerto juga sangat baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban masyarakat selalu terlibat dalam pengelolaan dana desa pada APBDes. Artinya pemerintah desa sangat transparan kepada masyarakat desa, oleh sebab itu masyarakat juga percaya sepenuhnya kepada pemerintah desa dalam hal pembangunan desa. Pengawasan dana desa selain diawasi oleh kecamatan, kabupaten, Inspektorat, dan BPK, masyarakat desa juga ikut mengawasi kinerja pemerintah desa, melalui *Open Data Desa* masyarakat dapat mengakses dan melihat aliran dana untuk apa

saja dan apakah hal tersebut benar dengan yang terjadi di lapangan. Kendala pemerintah Desa Bomerto dalam pelaksanaan dana desa adalah dengan dikeluarkannya peraturan baru yaitu bahwa penggunaan dana desa ditentukan untuk program perlindungan sosial berupa BLT DD atau Bantuan Tunai Langsung Dana Desa yang paling sedikit 40 persen dari pagu Dana Desa. Hal ini wajib dilakukan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia karena telah diatur dalam Peraturan Presiden, namun Desa Bomerto mengalami kendala karena tidak bisa memfasilitasi seluruh masyarakat dengan BLT DD. Hal ini juga menimbulkan konflik antar masyarakat serta masyarakat dengan perangkat desa.

Jadi, dana desa sudah sangat berperan dalam mengatasi kemiskinan di Desa Bomerto tetapi untuk urbanisasi di Desa Bomerto masih belum dapat ditekan dengan dana desa, artinya dana desa belum berperan dalam mengurangi urbanisasi. Selain dapat mengatasi kemiskinan melalui dana desa, Desa Bomerto dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Artinya dana desa melalui pembentukan dan pengembangan BUMDes serta pembangunan infrastruktur desa dengan dana desa telah berperan dalam mengatasi pengangguran di Desa Bomerto.

Berikut adalah hasil olah data dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo yaitu Iryawati :



Gambar 4.11 Hasil Wawancara Iryawati Masyarakat Desa Bomerto Kec. Wonosobo

Berdasarkan gambar di atas masyarakat mengetahui tentang dana desa dengan adanya musyawarah dusun dan musyawarah desa. Menurut Iryawati, pemerintah dalam mengelola dana desa sudah bijak dan masyarakat sangat senang dikarenakan melalui musdus dan musdes pemerintah desa benar-benar menampung aspirasi masyarakat desa dan sebagian besar diwujudkan oleh pemerintah desa. Iryawati mengungkapkan bahwa kadang keterlambatan

pencairan dana desa membuat pembangunan fisik terhambat, tidak hanya pembangunan fisik saja namun pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan atau penyuluhan bahkan pengembangan usaha kecil juga ikut terhambat. Masyarakat Desa Bomerto sangat antusias dengan adanya dana desa karena dana desa memang sangat berperan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, terutama kemiskinan karena Desa Bomerto sendiri termasuk desa dengan kemiskinan tertinggi. Kesamaan antara yang diungkapkan Sudibyo Sekretaris Desa Bomerto, Iryawati juga mengungkapkan bahwa BLT DD menjadi konflik antar masyarakat karena jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan BLT DD masyarakat tersebut memiliki rasa iri dan cenderung mengadu ke pemerintah desa mengapa masyarakat tersebut tidak mendapatkan BLT DD.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disajikan secara ringkas bahwa apa yang disampaikan oleh kecamatan dan pemerintah desa sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, hal ini diungkapkan oleh masyarakat desa yang telah merasakan dampak positif adanya dana desa. Artinya dana desa memang sangat berperan dalam mengatasi ekonomi desa yaitu mengatasi kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran. Hal ini sesuai dengan rujukan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian Wulan Budiningsih dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)”, Fadli Razzak & Zuly Qodir dengan judul “Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalorejo, dan Desa Kalangan, Klaten, Jawa Tengah)”, dan Cut Badratus Navis yang berjudul “Peran Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh” , bahwa dengan adanya dana desa dapat mengatasi kemiskinan dikarenakan dapat memperluas lapangan pekerjaan di desa, mengadakan pelatihan bagi masyarakat desa yang nantinya akan membuat masyarakat desa menjadi semakin produktif sehingga diharapkan dapat menurunkan urbanisasi dan pengangguran di desa, selain itu pemerintah desa dapat membentuk dan mengembangkan BUMDes dengan dana desa yang nantinya dapat mengurangi pengangguran serta dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dana desa telah berperan dalam mengatasi kemiskinan di Desa Wonosari dan Desa Bomerto, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan angka *stunting* dan terealisasinya program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya pada jambanisasi. Dana desa dinilai sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, Desa Wonosari dan Desa Bomerto sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pengentasan kemiskinan.
2. Dana desa telah berperan dalam mengatasi urbanisasi di Desa Wonosari, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lahan persawahan serta fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah desa seperti fasilitas kejar paket A/B/C, dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, dan Pemerintah Desa Wonosari mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa tetapi sebaliknya, dana desa kurang berperan dalam mengatasi urbanisasi di Desa Bomerto karena pemerintah belum bisa menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan pada kenyataannya masyarakat Desa Bomerto masih banyak yang mencari pekerjaan di kota bahkan ke luar negeri.
3. Dana desa telah berperan dalam mengatasi pengangguran dengan pembentukan dan pengembangan BUMDes serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa atau program Padat Karya Tunai (PKT). Artinya harapan pemerintah dengan dilaksanakan kebijakan dana desa ini telah terealisasi dengan baik dalam mengatasi pengangguran. BUMDes dinilai menjadi salah satu indikator terbaik dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat desa.
4. Peranan dana desa menjadi sangat signifikan dalam mengatasi ekonomi desa di Desa Wonosari dan Desa Bomerto. Apabila kebijakan dana desa dihilangkan maka desa cenderung tidak berkembang bahkan tidak maju. Dana desa

merupakan dana transfer terbesar dalam pendapatan desa, dana desa sangat berperan dalam mengatasi ekonomi desa yaitu kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adapun beberapa saran kepada beberapa pihak yaitu :

1. Sebaiknya desa jangan terlalu mengandalkan dana desa, dengan adanya dana desa seharusnya desa dapat menggali potensi desa dan mengembangkan potensi desa agar nantinya dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Jadi, nantinya apabila dana desa dihilangkan atau dihapuskan desa akan tetap berkembang dengan PAD.
2. Kepada Pemerintah Pusat sebaiknya meningkatkan efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT DD, dikarenakan BLT DD dinilai kurang tepat sasaran dan menimbulkan konflik di desa, pemerintah desa sendiri juga merasa “kewalahan” dengan adanya BLT DD.
3. Kepada peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti mengenai peranan dana desa lebih baik difokuskan pada peranan dana desa dalam mengatasi urbanisasi, karena dana desa belum bisa sepenuhnya berperan dalam mengatasi urbanisasi. Adapun referensi lain untuk peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti judul penelitian ini dapat menggali lebih dalam mengenai informasi dari informan pendukung yaitu masyarakat desa yang tidak setuju dengan implementasi dana desa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dengan penggunaan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa dengan BLT DD menimbulkan konflik dan rasa iri terhadap sesama masyarakat desa, oleh sebab itu masyarakat desa kurang puas dengan program BLT DD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F. (2019). Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mempang di Kabupaten Gowa.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021, November 18). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah Tahun 2015-2020*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html> dan <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Tahun 2020-2021*. Jakarta: BPS.
- BAPPENAS RI. (2005). *STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN*. Jakarta: BAPPENAS RI.
- Budiningsih, W. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.
- Darwita, I., & Redana, D. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 NO. 1*.
- Desa Bomerto. (2017, Juli 25). *Open Data Desa*. Retrieved from https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/apbdesa/apbdesa__33.07.09.2017__78e71cff26678f5973dd5a946b14de4d
- Desa Bomerto. (2020, Januari 24). *Open Data Desa*. Retrieved from https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/apbdesaperubahan/apbdesaperubahan__33.07.09.2017__609f52b991b4c431f0177c318eca38c5
- Desa Bomerto. (2020, Desember 17). *Open Data Desa*. Retrieved from https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/apbdesaperubahan/apbdesaperubahan__33.07.09.2017__8afaa3c34a37a84aa3dad47659893846
- Desa Bomerto. (2020). *Profil Desa Tingkat Perkembangan Desa Bomerto Tahun 2020*. Wonosobo: Pemerintah Desa Bomerto.
- Desa Bomerto. (2021, Desember 8). *Pantau Desa Bomerto*. Retrieved from Open Data Desa Kabupaten Wonosobo: <https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/desa/33.07.09.2017#>
- Desa Bomerto. (2021, Desember 3). *Profil Desa*. Retrieved from Desa Bomerto Web site: <https://bomerto->

- wonosobo.wonosobokab.go.id/postings/details/1032775/Sejarah_Desa.HTML
- Desa Bomerto. (2022, Januari 18). *Open Data Desa*. Retrieved from https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/apbdesaperubahan/apbdesaperubahan__33.07.09.2017__2ac6f790d0250edcd9249749f9206022
- Desa Wonosari. (2018, September 12). *Open Data Desa*. Retrieved from https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/apbdesa/apbdesa__33.07.09.2016__78e71cff26678f5973dd5a946b14de4d
- Desa Wonosari. (2019, Januari 5). *Open Data Desa*. Retrieved from https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/apbdesa/apbdesa__33.07.09.2016__609f52b991b4c431f0177c318eca38c5
- Desa Wonosari. (2020, November 25). *Open Data Desa*. Retrieved from https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/apbdesaperubahan/apbdesaperubahan__33.07.09.2016__8afaa3c34a37a84aa3dad47659893846
- Desa Wonosari. (2021, Desember 7). Retrieved from https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/apbdesaperubahan/apbdesaperubahan__33.07.09.2016__2ac6f790d0250edcd9249749f9206022
- Desa Wonosari. (2021, Desember 8). *Pantau Desa Wonosari*. Retrieved from Open Data Desa Kabupaten Wonosobo: <https://datadesa.wonosobokab.go.id/pantau/desa/33.07.09.2016#>
- Desa Wonosari. (2021, Desember 6). *Profil Desa*. Retrieved from Website Resmi Desa Wonosari "Wonosari Maer": [https://wonosari-wonosobo.wonosobokab.go.id/media/upload/20191005021016_Profil_Desa_\(Perkembangan\)_Desa_Wonosari.pdf](https://wonosari-wonosobo.wonosobokab.go.id/media/upload/20191005021016_Profil_Desa_(Perkembangan)_Desa_Wonosari.pdf)
- Desa Wonosari. (2021, Desember 3). *Website Resmi Desa Wonosari "Wonosari Maer"*. Retrieved from Website Resmi Desa Wonosari "Wonosari Maer" : Sejarah Desa: https://wonosari-wonosobo.wonosobokab.go.id/postings/details/164/Sejarah_Desa.HTML
- EGSA UGM. (2021, November 11). *Apa itu Pengangguran?* Retrieved from EGSA UGM Web Site: <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2019/09/29/apa-itu-pengangguran/>
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society Vol. I No 1*.
- Harahap, T. (2019). Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

- Haryati, T., & Suciptaningsih, O. A. (2017). IMPLEMENTASI MODEL PENGELOLAAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER INTERGRATIF DI UNIVERSITAS PGRI SEMARANG.
- Hulu, Y. H., & Nasution, M. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Isyanah, A. (2020). *Urbanisasi Melaju Cepat, Kita Bisa Apa?* Jakarta: detikNews. Retrieved November 19, 2021, from <https://news.detik.com/kolom/d-5233999/urbanisasi-melaju-cepat-kita-bisa-apa>
- Kecamatan Wonosobo. (2021, Desember 3). *Profil Kecamatan Wonosobo*. Retrieved from Kecamatan Wonosobo Web site: https://kecamatanwonosobo.wonosobokab.go.id/postings/detail/1031037/Profil_Kecamatan_Wonosobo.HTML
- Kemenkeu RI. (2019). *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). *INI TIGA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2022*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta: Humas Kemendes PDPT. Retrieved from <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022>
- Kominfo RI. (2011). *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Informatika RI.
- Larosa, A. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Natalia, F. (2021). *Dana Desa Dilaporkan Telah Menyerap Jutaan Tenaga Kerja untuk Penanganan Covid-19*. Jakarta: Kompas.TV. Retrieved November 19, 2021, from <https://www.kompas.tv/article/231327/dana-desa-dilaporkan-telah-menyerap-jutaan-tenaga-kerja-untuk-penanganan-covid-19>
- Navis, C. B. (2018). Peran Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh.

- Pangke, R. A., Kumenaung, A. G., & Kalangi, J. B. (2019). Efektivitas Peranan dana Desa terhadap Pendapatan Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 03*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 .
- Purnamasari, D. M. (2020). *Mendagri Sebut Dana Desa untuk Rem Urbanisasi*. Jakarta: Kompas.com. Retrieved November 15, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/07/13192221/mendagri-sebut-dana-desa-untuk-rem-urbanisasi>
- Razzak, F., & Qodir, Z. (2020). Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalejo, dan Desa Kalangan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Rini, S. (2021). Desa Wonosari, Jawa Tengah, Wonosobo.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Saniya, C. A. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Aktivitas Pariwisata Kota Lama Semarang dalam Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat.
- Sigit, T. A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 105-119.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

- Sujoko, W. S. (2019). Efektivitas Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Pedesaan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan).
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V., & Mirah, A. D. (2017). Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 335-342.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usmaliadanti, C. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009.
- Wicaksono, K. A. (2017). *Dana Desa Diharapkan Bisa Tekan Urbanisasi*. Jakarta: Bisnis.com. Retrieved November 15, 2021, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170504/9/650866/dana-desa-diharapkan-bisa-tekan-urbanisasi>
- Yanuar. (2009). *Ekonomi Makro Suatu Analisis untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Olah Data Dana Desa Menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus

1. Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Kecamatan Wonosobo

[<Files\\Narasi Wawancara\\Randi Ramadhan>](#) - § 10 references coded [0.83% Coverage]

Reference 1 - 0.08% Coverage

1. kecamatan lebih mengawasi dan membina dana desa sudah maksimal atau belum

Reference 2 - 0.08% Coverage

2. Program pemerintah sekarang terutama di dana desa dimana ada program dalam

Reference 3 - 0.08% Coverage

3. jadi itu prioritas dalam penggunaan dana desa. Kemudian di dalam indikator

Reference 4 - 0.08% Coverage

4. jalan.
5. Sangat berpengaruh adanya kebijakan dana desa ini karena ada 4

Reference 5 - 0.08% Coverage

6. karena ada 4 bidang dalam dana transfer desa itu ada 4

Reference 6 - 0.08% Coverage

7. pemberdayaan terus banyak lah jadi dana desa itu dialokasikan disitu dan

Reference 7 - 0.08% Coverage

8. faktor yang sudah ditingkatkan dari dana desa seperti kemiskinan kemudian ada

Reference 8 - 0.08% Coverage

9. bagi desa jadi kalau seumpama dana transfer desa itu dihilangkan mungkin

Reference 9 - 0.08% Coverage

10. apa-apa di desa. Jadi dana desa itu sangat penting untuk

Reference 10 - 0.08% Coverage

11. DD itu harus 40 % dari dana desa kemudian di pertanian bidang

2. Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Desa Wonosari

[<Files\\Narasi Wawancara\\Sandia Rini>](#) - § 10 references coded [0.95% Coverage]

Reference 1 - 0.10% Coverage

12. Kalau untuk proses perencanaan, kan dana desa termasuk dalam APBDes yaitu

Reference 2 - 0.10% Coverage

13. desa termasuk dalam APBDes yaitu dana transfer desa. Pertama kita mengadakan

Reference 3 - 0.10% Coverage

14. depan.

15. Kondisi kemiskinan sudah menengah.

1. Dana desa sangat berperan dalam mengatasi

Reference 4 - 0.10% Coverage

1. mengatasi kemiskinan karena semuanya pakai dana desa untuk pengentasan kemiskinan. Kalau

Reference 5 - 0.10% Coverage

2. desa, kalau kemiskinan pasti pakai **dana** desa. Jadi kalau tidak ada

Reference 6 - 0.10% Coverage

3. desa. Jadi kalau tidak ada **dana** desa ya kita susah untuk

Reference 7 - 0.10% Coverage

4. kalau kita ada proyek infrastruktur **dana** desa atau bantuan gubernur kita

Reference 8 - 0.10% Coverage

5. memfasilitasi masyarakat dalam hal pendidikan.

2. Dana desa juga telah mengurangi pengangguran

Reference 9 - 0.10% Coverage

6. membuka lapangan pekerjaan. Tanpa adanya **dana** desa BUMDes tidak berjalan. BUMDes

Reference 10 - 0.10% Coverage

7. tidak ada kendala dalam pelaksanaan **dana** desa.

[<Files\\Narasi Wawancara\\Towilah>](#) - § 7 references coded [1.99% Coverage]

Reference 1 - 0.28% Coverage

8. kader PKB mereka tahu aliran **dana** kemana. Toh sekarang kita kan

Reference 2 - 0.28% Coverage

9. data desa, kita bisa tahu **dana** desa untuk apa saja. Jadi

Reference 3 - 0.28% Coverage

10. yang dibuat pemerintah desa dengan **dana** desa sudah bagus, ada sedikit

Reference 4 - 0.28% Coverage

11. dan PKB sudah di dania **dana** desa.

12. Dana desa sangat bermanfaat

Reference 5 - 0.28% Coverage

13. sudah di dania dana desa.

3. Dana desa sangat bermanfaat bagi desa

Reference 6 - 0.28% Coverage

14. BUMDes itu kalau bisa dialiri dana untuk modal entah untuk simpan

Reference 7 - 0.28% Coverage

15. apabila nanti setelah tidak ada dana desa kan hanya itu saja

3. Peranan Dana Desa dalam Mengatasi Ekonomi Desa di Desa Bomerto

[<Files\\Narasi Wawancara\\Sudiby>](#) - § 13 references coded [0.75% Coverage]

Reference 1 - 0.06% Coverage

1. kita untuk mengatasi itu di dana desa kita ada PPG (Pos

Reference 2 - 0.06% Coverage

2. kegiatan dan kebutuhan masyarakat dari dana desa kita kan dari banyak

Reference 3 - 0.06% Coverage

3. pemberdayaan dan pembangunan itu dari Dana Desa, kalau yang bisa masuk

Reference 4 - 0.06% Coverage

4. bidang, yang bisa masuk untuk dana desa itu hanya bidang 2

Reference 5 - 0.06% Coverage

5. sektoral itu bisa di danai dana desa tapi kalau untuk keperluan

Reference 6 - 0.06% Coverage

6. keperluan pemerintahan itu tidak bisa dana desa itu tidak bisa dipakai

Reference 7 - 0.06% Coverage

7. untuk menganggarkan ATK saya menggunakan dana desa o itu tidak bisa

Reference 8 - 0.06% Coverage

8. untuk menciptakan lapangan kerja dari dana des, ya salah satu sih

Reference 9 - 0.06% Coverage

9. dimanfaatkan, salah satu bagian kecil dana desa yang dimanfaatkan untuk mengurangi

Reference 10 - 0.06% Coverage

10. Ya kalau dari masyarakat ketika dana desa cair, sudah bisa terserap

Reference 11 - 0.06% Coverage

11. untuk menyerap tenaga kerja dari dana desa itu ketika yang fisik

Reference 12 - 0.06% Coverage

12. lokal dan itu sumbernya dari dana desa dan dari Banku des

Reference 13 - 0.06% Coverage

13. BPD untuk dalam pengawasan pelaksanaan dana desa, selain itu kita juga

[<Files\\Narasi Wawancara\\Iryawati>](#) - § 8 references coded [2.23% Coverage]

Reference 1 - 0.28% Coverage

1. Masyarakat mengetahui tentang dana desa, jadi pemerintah memang sudah

Reference 2 - 0.28% Coverage

2. pemerintah memang sudah terbuka akan dana desa, karena ada undangan untuk

Reference 3 - 0.28% Coverage

3. untuk musdes dan musdus.
4. Untuk dana desa menurut saya sudah bijak

Reference 4 - 0.28% Coverage

5. cuman kadang keterlambatan untuk pencairan **dana** yang disayangkan. Kalau untuk pembangunan

Reference 5 - 0.28% Coverage

6. Bomerto sangat terbantu dengan adanya **dana** desa.
7. Fasilitas fisik, sosial yang

Reference 6 - 0.28% Coverage

8. berapa itu tapi dengan adanya **dana** desa tuh ada. GOR yang

Reference 7 - 0.28% Coverage

9. kas desa.
10. Senang dengan adanya **dana** desa, ketika mau ada usulan

Reference 8 - 0.28% Coverage

11. terbantu sekali masyarakat dengan adanya **dana** desa.
12. Mudah mudahan menjadi lebih

Lampiran B

TRANSKRIP WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Randi Ramadhan, S.STP
Jabatan : Kasi Pemer Kecamatan Wonosobo
Alamat : Bugangan Wonosobo
Tanggal Wawancara : 10 Desember 2021 pukul 11.23 WIB

B. PERTANYAAN

Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Wonosobo

1. Bagaimana peranan Kecamatan Wonosobo dalam mengatasi ekonomi desa di Kecamatan Wonosobo (kemiskinan, urbanisasi, pengangguran)?

Sebenarnya peran kecamatan itu lebih berperan dalam fungsi pengawasan, dan pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa, kalau nggak salah itu tertuang di Permendagri Nomor 23 tahun berapa saya lupa, pengawasan itu di desa oleh APIP selaku Inspektorat kemudian langsung pak camat. Jadi kecamatan lebih mengawasi dan membina dana desa sudah maksimal atau belum dalam penggunaannya.

2. Bagaimana kondisi kemiskinan, tingkat urbanisasi, tingkat pengangguran di Kecamatan Wonosobo?

Mengacu pada IDM (Indeks Desa Membangun) jadi di Kecamatan Wonosobo ada 7 desa, kategori desa berkembang 4 desa Jogoyitnan, Pancurwening, Wonosari, Tlogojati. Desa maju itu ada Wonolelo, Bomerto, Sariyoso. Program pemerintah sekarang terutama di dana desa dimana ada program dalam arti pemulihan ekonomi nasional, kemudian ada program prioritas nasional, kemudian mitigasi bencana alam dan non alam jadi itu prioritas dalam penggunaan dana desa. Kemudian di dalam indikator pemulihan ekonomi nasional itu terdapat yang harus dicapai desa yaitu SDGs itu meliputi penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Jadi

banyak sekali indikator kemiskinan itu banyak sekali contohnya yang punya jamban, kemudian RTLH. Jadi diantara 7 desa tadi yg saya sebutkan tahun 2020 dan 2021 yang *stunting* paling tinggi adalah Desa Jogoyitnan sama Tlogojati. Itu yang masih membuat PR di kecamatan dimana tahun berikutnya indikator tersebut seperti *stunting* diantara dua desa bisa dimaksimalkan kemudian angka *stunting* turun jadi mereka tidak termasuk ke desa yang mempunyai indikator yang harus ditingkatkan dalam kemiskinannya.

3. Diantara desa-desa di Kecamatan Wonosobo, desa mana yang tingkat kemiskinan, urbanisasi, dan penganggurannya rendah?

Kalau untuk melihat dari urutan, banyak sekali indikatornya kalau Indeks Desa Membangun itu indikatornya sangat banyak sekali dek, seperti contoh IDM itu kependudukan, di kependudukan itu ada jenis kelamin, agama, pekerjaan, kemudian tingkat pendidikan, kepemilikan KK, kelompok usia dan lain-lain, kemudian disabilitas masih masuk juga ada kesejahteraan sosial, ada keuangan, ada kesehatan, ada BUMDes nya dan lain-lain. Sosial budaya itu indikator banyak sekali ya, ada Rumah Tidak Layak Huni, jadi kalo urutannya mungkin, desa maju Indeks Desa Membangun yang indikatornya maju itu ada Wonolelo, Bomerto, Sariyoso kemudian yang desa masih berkembang ada Jogoyitnan, Pancurwening, Wonosari, Tlogojati ya mungkin yang saya sebutkan di pertanyaan kedua itu mungkin yang masih PR adalah Tlogojati dan Jogoyitnan karena apa, karena tingkat *stunting* mereka masih tinggi.

4. Desa mana saja yang BUMDes nya sudah berjalan dengan baik?

Kalau BUMDes yang sudah berkembang itu Bomerto karena mereka sudah berjalan karena mereka punya lapangan futsal kemudian ada Wonosari yang juga memberdayakan seperti pemberdayaan seperti persewaan tralis, alat-alat pesta mungkin dua itu yang BUMDes nya sudah mulai jalan.

5. Apakah dana desa ini sangat berpengaruh dalam mengatasi ekonomi desa? Misalnya dengan adanya dana desa yang diberikan setiap tahun dan cenderung meningkat tiap tahunnya apakah sudah bisa mengurangi kemiskinan?

Sangat berpengaruh adanya kebijakan dana desa ini karena ada 4 bidang dalam dana transfer desa itu ada 4 bidang pemberdayaan terus banyak lah jadi dana desa itu dialokasikan disitu dan banyak sekali faktor-faktor yang sudah

ditingkatkan dari dana desa seperti kemiskinan kemudian ada pembentukan pengembangan serta peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut kemudian ada pengembangan pembangunan usaha ekonomi produktif, banyak sekali pokoknya yang untuk bermanfaat bagi desa jadi kalau seumpama dana transfer desa (dana desa) itu dihilangkan mungkin desa mati, pemerintahan mereka cenderung akan ya tidak apa-apa di desa. Jadi dana desa itu sangat penting untuk pemerintah desa.

6. Bagaimana cara bapak melakukan pengawasan terhadap kebijakan dana desa ini?

Sangat banyak dalam arti kita lebih condong pengelolaan keuangan desa dimana seperti desa mau bikin acara apa kita harus tau secara teknis bahwa uang tersebut digunakan benar-benar tidak salah dan sesuai dengan kode rekening atau kegiatan yang ada di APBDes yang sudah tertuang secara prioritas seperti di SDGs yang memang pemerintah menekankan itu kemudian pembangunan fisik kita harus betul-betul mengawasi apakah bermanfaat pembangunan fisik tersebut atau hanya memang untuk gaya-gayaan dan sesuai dengan aturan dalam arti volume dalam pembangunan fisik tersebut, ya memang secara teknis kecamatan kota bersama pak camat memang harus sering turun ke desa dalam menangani pengawasan tersebut.

7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa ini?

Kendala pasti ada setiap sektor setiap bidang itu pasti ada bagaimanapun contohnya seperti sekarang saat ini di akhir tahun ini kita harus menyesuaikan dengan perpres terbaru Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang kebijakan yang harus BLT DD itu harus 40 % dari dana desa kemudian di bidang pertanian 20%, jadi apa kita harus dituntut untuk melakukan perubahan, bahwasannya kemarin desa sudah membuat RKP nya sudah melaksanakan sesuai tuntunan tapi tiba-tiba ada penyesuaian kebijakan terkait dengan perpres tersebut, mungkin kendalanya kita harus memang betul-betul mengetahui desa, bagaimana desa harus menyesuaikan aturan pusat kita harus ya lebih bermain hati untuk memberikan informasi ke desa.

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Sandia Rini, ST
Jabatan : Sekretaris Desa Wonosari
Alamat : Kebumen RT 01 RW 01 Desa Wonosari
Tanggal Wawancara : 1 Desember 2021 pukul 10.43

B. PERTANYAAN

Sekretaris Desa Wonosari

1. Bagaimana proses perencanaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Wonosari?

Kalau untuk proses perencanaan, kan dana desa termasuk dalam APBDes yaitu dana transfer desa. Pertama kita mengadakan musdes dulu untuk penampungan usulan dari masyarakat perdusun. Sebelum adanya musdes dilakukan musdus terlebih dahulu untuk musyawarah di dusun jadi nanti kadus masing-masing dusun mengumpulkan warganya untuk musyawarah bersama, apa sih prioritas dari dusun tersebut. Nah, apa kegiatan yang prioritas nanti untuk dibawa ke musyawarah desa. Ketika musdes kami juga mengundang kelompok masyarakat banyak sekali masyarakatnya RT, RW, BPD, disabilitas, dari tokoh pendidik, petani, dari masyarakat kurang mampu pokoknya dari pedoman RKP kabupaten ke desa kami laksanakan. Setelah itu kami menyusun rancangan RKP nantinya disampaikan ketika musdes ketika di forum disepakati kami musyawarah dengan BPD nanti yang memutuskan disetujui atau tidak itu BPD dan pemerintah desa. Dari RKP kita menyusun APBDes, saat ini masih proses penyusunan APBDes itu merujuk dari RKP dan RPJMDes. Kita menyusun RKP juga dari RPJMDes pak kades, RPJM nya kan untuk jangka waktu 6 tahun. Nah, yang ditahun depan itu apa saja yang dilaksanakan itu harus mengacu pada RPJMDes. APBDes juga demikian mengacu pada RKP dan RPJMDes, untuk penyusunan saya menyusun rancangan APBDes kemudian nanti kita musyawarahkan dengan BPD jika sudah sepakat ya sudah ditetapkan.

2. Apa saja yang menjadi prioritas dana desa di Desa Wonosari?

Kalau selama ini kita setiap tahun ada yang untuk kemiskinan itu pasti ada. Contohnya untuk RTLH jambanisasi, alhamdulillah di tahun ini Wonosari

sudah *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan jadi sudah tidak ada yang plung lab, terus selain itu untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat sendiri kita melibatkan selalu ada PKK, posyandu itu kan juga untuk mengentaskan kemiskinan dan PAUD juga ada. Kalau untuk *stunting* Wonosari itu nol karena selalu didukung dengan posyandu dan PAUD.

3. Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap kemiskinan di Desa Wonosari?

Untuk kemiskinan saya lihat Wonosari sudah menengah dan paling kemarin data yang masuk di RTLH itu sekitar 30 an insyaallah tuntas di tahun depan.

4. Bagaimana kondisi kemiskinan di Desa Wonosari?

Kondisi kemiskinan sudah menengah.

5. Tujuan kebijakan dana desa ini salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, lalu bagaimana peranan dana desa dalam mengatasi kemiskinan di Desa Wonosari?

Dana desa sangat berperan dalam mengatasi kemiskinan karena semuanya pakai dana desa untuk pengentasan kemiskinan. Kalau ADD hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kalau kemiskinan pasti pakai dana desa. Jadi kalau tidak ada dana desa ya kita susah untuk pengentasan kemiskinan jadi sangat membantu dan berpengaruh.

6. Kebijakan dana desa ini juga merupakan harapan pemerintah untuk menekan urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota), bagaimana kondisi urbanisasi di Desa Wonosari?

Kalau disini tidak begitu banyak yang keluar karena rata-rata itu petani terus yang tukang-tukang itu kalau kita ada proyek infrastruktur dana desa atau bantuan gubernur kita memberdayakan masyarakat tukang yang ada disini, tidak pernah kita mencari tukang dari luar desa dan untuk material di sini ada dua toko material itu kita ambil salah satu atau dua duanya. Yang bisa bekerja sama dengan desa ada toko kita beli jadi kita nggak beli di luar.

7. Apakah dana desa sudah berperan dalam menekan urbanisasi di Desa Wonosari?

Sudah dapat menekan urbanisasi, karena pemerintah Desa Wonosari selalu memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan seperti misalnya tadi yang disampaikan jika membangun infrastruktur misalnya kita menggunakan tukang-tukang dari desa tidak pernah ambil dari luar. Di Desa Wonosari juga terdapat program kejar paket hal ini dapat memfasilitasi masyarakat dalam hal pendidikan.

8. Adanya kebijakan dana desa ini diharapkan juga dapat memberdayakan masyarakat desa yang artinya dana desa ini dapat mengurangi angka pengangguran di desa dan mengurangi terjadinya urbanisasi tadi itu, bagaimanakah peran dana desa dalam mengatasi pengangguran? Apakah dana desa dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat? Seperti misalnya dengan dibentuknya BUMDes yang dapat menciptakan lapangan kerja di desa. Dana desa juga telah mengurangi pengangguran di Desa Wonosari karena adanya BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan. Tanpa adanya dana desa BUMDes tidak berjalan. BUMDes di Desa Wonosari yaitu persewaan alat pesta, simpan pinjam tetapi masih sebagian, persewaan alat tralis, rumah jamur pembudidayaan jamur tiram, kedepan akan diadakan wisata (desa wisata).
9. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa?
Cukup antusias, seperti infrastruktur kita kan memberdayakan masyarakat jadi nggak semua tukang yang mengerjakan. Misalkan membuat drainase, dalam menggantinya kan tidak semua menggunakan tenaga tukang jadi kita mengerahkan warga untuk gotong royong.
10. Bagaimana cara ibu dalam melakukan pengawasan selama masa pelaksanaan dana desa berlangsung?
Kalau untuk pengawasan di setiap kegiatan kita pasrahkan pada kasi dan kaur yang membidangi. Kita kontrol ke kasi dan kaurnya itu harus jadi tanggal segini, harus sesuai volume, harus sesuai RAB. Jadi yang mengontrol ke lapangan kasi dan kaur yang membidangi.
11. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa?
Selama ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan.

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Sudiby, SE
Jabatan : Sekretaris Desa Bomerto
Alamat : Dusun Wonojoyo RT 02 RW 02 Desa Bomerto
Tanggal Wawancara : 2 Desember 2021 pukul 11.30 WIB

B. PERTANYAAN

Sekretaris Desa Bomerto

1. Bagaimana proses perencanaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Bomerto?
Kebetulan akhir tahun 2021 kita baru saja menyelesaikan proses penyusunan RKP desa untuk tahun 2022. Sebenarnya untuk bulan Juli-November untuk penyusunan RKPDes. Setelah RKP Desa selesai selanjutnya nanti RAPBDes tahun 2022 ini kita proses tahapan baru selesai RKPDes kita akan di bulan Desember ini menyelesaikan RABPDes dan melanjutkan sampai APBDes jadi nanti di Desember ini kita menentukan anggaran belanja desa untuk tahun 2022. Tahapannya itu, kita saat ini baru menyelesaikan RKPDes dan sedang dalam tahap penyusunan RAPBDes, RAPBDes untuk dijadikan APBDes. Itu tahapannya, kita sedang menyelesaikan itu untuk menentukan semua pekerjaan dan kegiatan di tahun 2022.
2. Apa saja yang menjadi prioritas dana desa di Desa Bomerto?
Sebenarnya jika kita merujuk ke peraturan pemerintah dan undang-undang harus lebih besar ke pemberdayaan, sebenarnya itu. Tetapi selama ini kita ya masih seimbang antara pembangunan fisik dan pemberdayaan.
3. Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap kemiskinan di Desa Bomerto?
Jelas skala prioritas, jadi skala prioritas kita di desa kita banyak lembaga-lembaga yang menjurus untuk menindaklanjuti program pemerintah desa salah satunya kita punya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), kita punya BASKOM (basis komunitas), kita punya FKD (Forum Kesehatan Desa) itu punya bidang masing-masing di bawah naungan PKK dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Itu kegiatan-kegiatan yang di bawah seperti itu organisasi-organisasi yang ada di Desa Bomerto.

4. Bagaimana kondisi kemiskinan di Desa Bomerto?

Secara garis besar kita masih termasuk miskin, salah satu faktor yang paling tinggi itu karena keadaan sanitasi khususnya di jamban karena memang capaian jamban kita masih rendah tetapi untuk progres peningkatannya sudah sangat signifikan, kita tahun 2019 jamban sehat kita 17% sekarang 2021 sudah sekitar 45% kita kenaikannya untuk keadaan jamban sehat. *Stunting* kita sudah lumayan teratasi salah satu kita untuk mengatasi itu di dana desa kita ada PPG (Pos Pemulihan Gizi) kita sudah jalankan beberapa tahun lalu kebetulan untuk akhir tahun ini belum kami rekap untuk KPM nah untuk salah satu lembaga di desa kita juga ada KPM (Kader Pembangunan Manusia) dan itu yang bertugas untuk memantau dan merekap tingkat *stunting* kebetulan ini untuk yang semester 2 ini belum selesai dirangkum laporan dari masing-masing dusun belum rampung jadi belum bisa kita selesaikan, tapi sedang dalam proses.

5. Tujuan kebijakan dana desa ini salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, lalu bagaimana peranan dana desa dalam mengatasi kemiskinan di Desa Bomerto?

Itu sangat jelas jadi sumber pendapatan desa kita yang paling utama untuk menopang semua kegiatan dan kebutuhan masyarakat dari dana desa kita kan dari banyak sumber, dari ADD untuk operasional pemerintahan desa khusus untuk operasional pemerintah desa itu ADD, untuk pemberdayaan dan pembangunan itu dari dana desa, kalau yang bisa masuk ke semua bidang, kita kan di mitra desa, di APBDes kita kan ada 5 bidang, yang bisa masuk untuk dana desa itu hanya bidang 2 dan 4 kecuali ada kegiatan yang lintas sektoral itu bisa di danai dana desa tapi kalau untuk keperluan pemerintahan itu tidak bisa dana desa itu tidak bisa dipakai jadi punya pos dan yang tidak bisa ditabrak. Misalkan untuk menganggarkan ATK saya menggunakan dana desa itu tidak bisa kecuali PADes (Pendapatan Asli Desa), itu bisa digunakan untuk apapun itu dan kita juga punya BHPRD itu bisa untuk kegiatan di semua bidang kecuali ADD sama DD itu dibidang tertentu aja.

6. Kebijakan dana desa ini juga merupakan harapan pemerintah untuk menekan urbanisasi, bagaimana kondisi urbanisasi di Desa Bomerto? Ya, berapa persen masih banyak yang mencari pekerjaan di luar kota itu masih banyak.

7. Apakah dana desa sudah berperan dalam menekan urbanisasi di Desa Bomerto? Belum begitu berperan, karena masih banyak yang mencari pekerjaan di luar kota bahkan luar negeri.
8. Adanya kebijakan dana desa ini diharapkan juga dapat memberdayakan masyarakat desa yang artinya dana desa ini dapat mengurangi angka pengangguran di desa dan mengurangi terjadinya urbanisasi tadi itu, bagaimanakah peran dana desa dalam mengatasi pengangguran? Apakah dana desa dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat? Seperti misalnya dengan dibentuknya BUMDes yang dapat menciptakan lapangan kerja di desa. Belum mampu untuk menciptakan lapangan kerja dari dana desa, ya salah satu sih ada mungkin hanya berapa persen tapi sudah ke arah situ salah satu contoh kita punya BUMDes disitu kita punya karyawan itu salah satu yang dimanfaatkan, salah satu bagian kecil dana desa yang dimanfaatkan untuk mengurangi ya paling tidak sedikit membuka lapangan pekerjaan. Sudah kita laksanakan kita lakukan itu di BUMDes, BUMDes kita sementara masih satu unit kegiatan kita punya GOR futsal disitu ada karyawan nah itu salah satu untuk menciptakan lapangan kerja, embrio kita untuk menciptakan lapangan kerja, menyediakan lapangan kerja. Jadi nantinya ini juga masih tahap baru untuk BUMDes nya jadi kami punya cita-cita visi misi untuk BUMDes kita bisa mengembangkan berbagai unit usaha sehingga nanti juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu salah satu yang sudah kita laksanakan.
9. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa?
Ya kalau dari masyarakat ketika dana desa cair, sudah bisa terserap ke rekening kas desa, dan ketika ada pembangunan fisik itu jelas melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban itu jelas kita melibatkan masyarakat nah itu juga salah satu contoh untuk menyerap tenaga kerja dari dana desa itu ketika yang fisik kita juga mempekerjakan warga lokal dan itu sumbernya dari dana desa dan dari Bankeudes juga. Jadi sumber pendapatan kita dari ADD, DD, BHPRD, PAD kita punya dua sumber yaitu GOR dan kios desa, dan yang sedang kita dapatkan dari Bankeudes Provinsi, kita juga punya sumber anggaran dari aspirasi kegiatan aspirasi dari yang

dibawakan oleh anggota dewan, sementara ada 6 sumber dari pendapatan desa kita.

10. Bagaimana cara bapak dalam melakukan pengawasan selama masa pelaksanaan dana desa berlangsung?

Pengawasan selain kita dari pemerintah desa kan kita pemerintahan desa ada dua, terdiri dari BPD dan pemerintah desa. Pemerintah desa itu terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan staff itu yang masuk dalam pemerintah desa. Jadi kita bersinergi dengan BPD untuk dalam pengawasan pelaksanaan dana desa, selain itu kita juga dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda kita juga ikut mengawasi kita, jadi ketika kita pemerintah desa menjalankan kewenangan dan kebijakan dan sebagainya, selain dari BPD sendiri dari masyarakat juga mengawasi kita, tentunya seperti itu jadi untuk perjalanan pemerintah desa kita banyak yang mengawasi termasuk dari atasan, kecamatan, kabupaten, Inspektorat, BPK dan sebagainya itu kita diawasi seperti itu.

11. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa?

Jelas tentunya beberapa kendala itu kegiatan salah satu yang paling banyak terjadi kendala itu pada tahun 2020-2021 kita diwajibkan menganggarkan BLT DD, dan itu wajib tetapi karena kita tidak bisa memfasilitasi semua warga makannya itu yang paling rawan menimbulkan konflik, karena kita tidak bisa memfasilitasi semua warga dan untuk bantuan di era pandemi ini untuk bantuan ke masyarakat itu banyak sekali sumbernya dan itu bervariasi besarnya, makannya itu kendala kita kendala yang berkaitan dengan bantuan kemasyarakatan. Ketika untuk fisik dan sebagainya itu karena kita ada kegiatan fisik kita langsung serahkan ke masyarakat, masyarakat yang melaksanakan pekerjaan kita hanya mengawasi itu aman-aman saja tetapi ketika berkaitan dengan bantuan itu yang paling sangat-sangat rawan sekali konflik karena banyak sekali sumber bantuan di pandemi ini dari PKH, dari kabupaten, provinsi, Dinsos, Kantor Pos, dan sebagainya yang banyak sekali sumber dan bervariasi besarnya dan bentuknya itu, itulah yang menjadi kendala kita dengan masyarakat kalau yang lain baik-baik saja selama ini, seperti itu mbak.

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Towilah
Jabatan : Masyarakat Desa Wonosari
Alamat : Wonosari RT 03 RW 03
Tanggal Wawancara : 2 Desember 2021

B. PERTANYAAN

Masyarakat Desa Wonosari

1. Apakah masyarakat desa mengetahui dana desa?

Ya sebagian besar tahu, terutama masyarakat yang mengikuti program-program yang ada di desa misalkan PKK, kader posyandu, kader PKB mereka tahu aliran dana kemana. Toh sekarang kita kan sudah lebih terbuka, kita sudah dapat mengakses *open data desa*, kita bisa tahu dana desa untuk apa saja. Jadi memang pemerintah desa saat ini sudah terbuka kepada masyarakat.

2. Bagaimana pendapat ibu sebagai masyarakat desa mengenai kebijakan program yang telah dibuat oleh pemerintah dengan dana desa?

Program-program yang dibuat pemerintah desa dengan dana desa sudah bagus, ada sedikit kurang bagusnya untuk lebih ke pembangunan manusia karena untuk pembangunan manusia kan kedepannya manusia akan menjadi lebih baik. Kalau pembangunannya di infrastruktur saja kedepannya tetap rusak, jalan yang masih layak saja kadang masih dibangun.

3. Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah desa?

Ada RTLH, pembuatan jambanisasi bagi warga yang tidak mampu, bantuan untuk usaha kecil, selain infrastruktur ada itu, kalau posyandu dan PKB sudah didanai dengan dana desa.

4. Bagaimana tanggapan ibu sebagai masyarakat desa dengan adanya dana desa tersebut?

Dana desa sangat bermanfaat bagi desa, dulu yang desa seperti apa sekarang kemajuannya lebih banyak, sekarang sudah berkembang pesat, sudah tidak ada jalan yang rusak, pembuangan air limbah sudah tertata dengan dibangunnya drainase.

5. Kebijakan bagaimana yang ibu (sebagai masyarakat desa) harapkan dari pemerintah desa untuk mendukung adanya dana desa tersebut?

Bagaimana pemerintah desa lebih memperkaya desa lagi seperti BUMDes. Jadi BUMDes itu kalau bisa dialiri dana untuk modal entah untuk simpan pinjam entah untuk operasional yang ada di BUMDes, karena hanya itu kekayaan desa, apabila nanti setelah tidak ada dana desa kan hanya itu saja yang ada di BUMDes.



A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Iryawati
Jabatan : Masyarakat Desa Bomerto
Alamat : Larangan RT 01 RW 03 Bomerto
Tanggal Wawancara : 13 Desember 2021

B. PERTANYAAN

Masyarakat Desa Bomerto

1. Apakah masyarakat desa mengetahui dana desa?
Masyarakat mengetahui tentang dana desa, jadi pemerintah memang sudah terbuka akan dana desa, karena ada undangan untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan RT untuk musdes dan musdus.
2. Bagaimana pendapat ibu sebagai masyarakat desa mengenai kebijakan program yang telah dibuat oleh pemerintah dengan dana desa?
Untuk dana desa menurut saya sudah bijak dalam melaksanakan program-program, cuman kadang keterlambatan untuk pencairan dana yang disayangkan. Kalau untuk pembangunan dan pemberdayaan sudah bagus, Desa Bomerto sangat terbantu dengan adanya dana desa.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah desa?
Fasilitas fisik, sosial yang kemarin ada itu pas covid ada BLT itu kan dari desa, bedah rumah dari desa juga ada tapi cuman berapa orang aja, disini pernah ada PNPM kita ngga ada jatah pada tahun berapa itu tapi dengan adanya dana desa tuh ada. GOR yang di desa juga jalan diurus oleh pemuda Desa Bomerto. Nantinya uangnya untuk kas desa.
4. Bagaimana tanggapan ibu sebagai masyarakat desa dengan adanya dana desa tersebut?
Senang dengan adanya dana desa, ketika mau ada usulan seperti apa ditanggapi, dipantau, pak lurahnya juga menyenangkan. Jadi terbantu sekali masyarakat dengan adanya dana desa.
5. Kebijakan bagaimana yang ibu (sebagai masyarakat desa) harapkan dari pemerintah desa untuk mendukung adanya dana desa tersebut?

Mudah mudahan menjadi lebih baik, angka kemiskinannya berkurang, karena Desa Bomerto juga termasuk tinggi angka kemiskinannya. Jadinya semoga warganya juga sadar, soalnya sejauh ini PKH kan paling banyak, kalau pengangguran itu jarang di Desa Bomerto. Kesadaran masyarakat juga belum maksimal, jadi kalau ada bantuan kadang iren-irenan “kenapa saya tidak?”. Di Desa Bomerto juga banyak yang pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan seperti Jakarta, ke Malaysia juga banyak disini.



Lampiran C
DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Wonosobo



Wawancara dengan Sekretaris Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo



Wawancara dengan Sekretaris Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo



Wawancara dengan Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo



Wawancara dengan Masyarakat Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo